



UAKPA

2025 LAPORAN KEUANGAN

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Audited)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Informasi yang disajikan telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai wujud akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan memberi informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2026
Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik

Ludiro



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK.....	6
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	8
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	10
LAPORAN KEUANGAN UTAMA	12
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	13
NERACA	14
LAPORAN OPERASIONAL.....	15
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	16
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	17
 PENJELASAN UMUM	 17
A.1 DASAR HUKUM	17
A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN	19
A.3 NILAI KINERJA ORGANISASI.....	20
A.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	21
A.5 BASIS AKUNTANSI	22
A.6 DASAR PENGUKURAN	22
A.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI	22
A.8 CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN	28
B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	31
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	31
B.2 BELANJA	33
B.2.1 Belanja Pegawai	36
B.2.2 Belanja Barang.....	38
B.2.3 Belanja Modal.....	40
B.2.4 PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA	42
 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	 42
C.1 ASET.....	42
C.1.1 ASET LANCAR	43
C.1.2 ASET TETAP	45
C.1.3 ASET LAINNYA.....	49
C.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	51
C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga.....	51
C.3 EKUITAS.....	52
 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	 52
D.1 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.....	52

D.2 BEBAN PEGAWAI	52
D.3 BEBAN PERSEDIAAN	53
D.4 BEBAN BARANG DAN JASA	53
D.5 BEBAN PEMELIHARAAN	54
D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS	54
D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	55
D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	55
D.9 KEGIATAN NON OPERASIONAL	56
D.10 PENJELASAN PERBEDAAN LO DAN LRA	56
 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	 57
E.1 EKUITAS AWAL	57
E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO	57
E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	58
E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	58
E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	58
E.6 EKUITAS AKHIR	60
 PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	 60
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	60
F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK	61
F.3. REKENING PEMERINTAH	61
F.4. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	62
 LAPORAN KEUANGAN PENDUKUNG	 69
CETAKAN LAPORAN KEUANGAN	69
LAPORAN KINERJA UNIT ORGANISASI	80
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI	86
SURAT HASIL REKONSILIASI DENGAN KPPN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian NKO Tahun 2025.....	20
Tabel 2 Penentuan Kualitas Piutang	26
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	27
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	28
Tabel 5 Capaian Kegiatan Prioritas Nasional	28
Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2025	30
Tabel 7 Realisasi PNBP untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025	31
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	32
Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025.....	34
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	34
Tabel 11 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja TA 2021 - 2025	34
Tabel 12 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025	35
Tabel 13 Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025	36
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	36
Tabel 15 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 - 2025.....	37
Tabel 16 Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025	38
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	38
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2021-2025.....	39
Tabel 19 Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025	40
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	40
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 – 2025	41
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel 23 Perbandingan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	42
Tabel 24 Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	43
Tabel 25 Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	43
Tabel 26 Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	43
Tabel 27 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	45
Tabel 28 Mutasi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	45
Tabel 29 Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	46
Tabel 30 Daftar Perbandingan Aset Tetap di Modul GLP dan Modul Aset per 31 Desember 2025 46	

Tabel 31 Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	46
Tabel 32 Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin	47
Tabel 33 Rincian Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	47
Tabel 34 Mutasi / Perubahan Aset Tetap Lainnya	48
Tabel 35 Rincian Daftar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	48
Tabel 36 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025	49
Tabel 37 Perbandingan Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel 38 Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel 39 Mutasi / Perubahan Aset Tak Berwujud	50
Tabel 40 Pelaksanaan RPATA	50
Tabel 41 Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	51
Tabel 42 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	51
Tabel 43 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..	51
Tabel 44 Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	53
Tabel 45 Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	53
Tabel 46 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	53
Tabel 47 Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	54
Tabel 48 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	55
Tabel 49 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	55
Tabel 50 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	56
Tabel 51 Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	56
Tabel 52 Perbandingan Nilai Ekuitas Awal	57
Tabel 53 Perbandingan Surplus/Defisit LO	58
Tabel 54 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	59
Tabel 55 Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir	60
Tabel 56 Rincian Penyelesaian Utang Kepada Pihak Ketiga Melalui Pemotongan SPM	60
Tabel 57 Rincian Penyelesaian Utang Kepada Pihak Ketiga Melalui Pemotongan SPM	61
Tabel 58 Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	61
Tabel 59 Daftar Rekening Lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	62
Tabel 60 DLI, DLR, dan Lini Masa Indikatif	63
Tabel 61 Rincian Indikator Terkait Pencairan Dana	66
Tabel 62 Rincian RO dan Sub Komponen Tahun 2025	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 - 2025	35
Grafik 2 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025	35
Grafik 3 Komposisi Belanja Pegawai TA 2025	37
Grafik 4 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 - 2025	37
Grafik 5 Komposisi Belanja Barang	39
Grafik 6 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2021-2025	39
Grafik 7 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2025	41
Grafik 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 - 2025	41



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA 015.06 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2025 *Audited* yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026

Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik

Ludiro



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2025 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp286.018.345,00**. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp47.302.407.636,00** atau mencapai **56,02** persen dari anggaran sebesar **Rp84.441.231.000,00**. Jumlah realisasi Belanja tersebut berasal dari realisasi Belanja Rupiah Murni dan Belanja Hibah.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp22.191.733.514,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp1.440.149.295,00**, Aset Tetap sebesar **Rp18.891.268.737,00**, dan Aset Lainnya sebesar **Rp1.860.315.482,00**.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar **Rp883.749.985,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar **Rp21.307.983.529,00**.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp0,00**, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar **Rp79.148.849.360,00** sehingga terdapat defisit dari

kegiatan operasional sebesar **Rp79.148.849.360,00**. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa surplus sebesar **Rp4.355.084,00** sehingga entitas mengalami defisit sebesar **Rp79.144.494.276,00**.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp23.112.071.933,00** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp79.144.494.276,00**, dan Transaksi antar entitas sebesar **Rp77.340.405.872,00** sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp21.307.983.529,00**.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Belanja Negara disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2025, nilai Pendapatan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



LAPORAN KEUANGAN UTAMA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2025			2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1		286.018.345	-	285.281.658
JUMLAH PENDAPATAN			286.018.345	-	285.281.658
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.424.288.000	4.041.698.000	91,35	3.662.339.000
Belanja Barang	B.2.2	72.266.289.000	36.126.915.639	49,99	56.241.899.346
Belanja Modal	B.2.3	7.750.654.000	7.133.793.997	92,04	10.278.311.047
JUMLAH BELANJA		84.441.231.000	47.302.407.636	56,02	70.182.549.393

Jakarta, Mei 2026
Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.1	59.742.906	50.733.906
Penyisihan Piutang tak Tertagih Bukan Pajak	C.1.1.2	(50.778.951)	(50.733.906)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		8.963.955	0
Persediaan	C.1.1.3	1.431.185.340	1.225.743.174
Jumlah Aset Lancar		1.440.149.295	1.225.743.174
ASET TETAP	C.1.2		
Peralatan dan Mesin	C.1.2.1	122.200.212.337	115.634.548.845
Gedung dan Bangunan	C.1.2.2	1.427.595.200	1.427.595.200
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.3	1.054.349.217	669.888.518
Akumulasi Penyusutan	C.1.2.4	(105.790.888.017)	(98.019.130.041)
Jumlah Aset Tetap		18.891.268.737	19.712.902.522
ASET LAINNYA	C.1.3		
Aset Tak Berwujud	C.1.3.1	11.457.396.464	13.454.416.464
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.1.3.2	954.513.675	1.236.983.804
Aset Lain-Lain	C.1.3.3	0	8.420.095.510
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	C.1.3.4	(10.551.594.657)	(19.638.304.512)
Jumlah Aset Lainnya		1.860.315.482	3.473.191.266
JUMLAH ASET		22.191.733.514	24.411.836.962
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang Kepada Pihak Ketiga		883.749.985	1.299.765.029
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		883.749.985	1.299.765.029
JUMLAH KEWAJIBAN		883.749.985	1.299.765.029
EKUITAS	C.3		
Ekuitas		21.307.983.529	23.112.071.933
JUMLAH EKUITAS		21.307.983.529	23.112.071.933
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.191.733.514	24.411.836.962

Jakarta, Mei 2026
Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan Operasional		0	0
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.980.907.000	3.723.130.000
Beban Persediaan	D.3	830.757.296	1.162.800.484
Beban Barang dan Jasa	D.4	48.261.083.846	43.089.664.897
Beban Pemeliharaan	D.5	6.055.065.286	7.665.466.271
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.794.861.753	24.798.370.143
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	9.226.129.134	11.926.855.784
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	45.045	(74.941)
Jumlah Beban Operasional		79.148.849.360	92.366.212.638
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(79.148.849.360)	(92.366.212.638)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar		201.885.812	149.454.654
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		281.635.261	0
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(79.749.449)	149.454.654
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		84.104.533	115.723.344
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		84.104.533	115.723.344
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.355.084	265.177.998
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(79.144.494.276)	(92.101.034.640)

Jakarta, Mei 2026
Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	PERIODE	
		31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E.1	23.112.071.933	26.442.894.850
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(79.144.494.276)	(92.101.034.640)
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi lain-Lain	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	77.340.405.872	88.770.211.723
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.5.1	47.302.407.636	70.182.549.393
Diterima dari Entitas Lain	E.5.2	(286.018.345)	(285.281.658)
Transfer Keluar	E.5.3	(605.625.000)	(1.841.360.856)
Transfer Masuk	E.5.4	237.000.000	330.933.750
Pengesahan Hibah Langsung	E.5.5	30.692.641.581	20.383.371.094
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.804.088.404)	(3.330.822.917)
EKUITAS AKHIR	E.6	21.307.983.529	23.112.071.933

Jakarta, Mei 2026
Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan

Bendahara Umum Negara;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.06/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.01.2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393/KMK.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Lingkup Kementerian Keuangan
31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga;
32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025;
33. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2/PB/2025 Tanggal 7 Januari 2026 Hal :

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Unaudited*);

34. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Atas Beban (BA-015) dan Gerakan Efisiensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tugas dan Fungsi

Perjalanan panjang Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintahan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan yang nyata dan luas kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai Keppres Nomor 165 Tahun 2000. Berdasarkan keputusan presiden tersebut, dibentuklah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD) melalui KMK-02/KMK.1/2001. Pada masa ini lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mempertegas konsep *money follow function*.

Pada tahun 2004 terjadi reorganisasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 2004 di mana tugas dan fungsi DJPKPD digabungkan dengan 2 unit eselon I lainnya, yaitu bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menjadi Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) serta bersama Badan Analisa Fiskal menjadi Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI). Reorganisasi kembali terjadi pada tahun 2007. DJAPK dipisah menjadi DJPK dan DJA. Fungsi-fungsi yang sebelumnya digabung dengan BAPPEKI dikembalikan.

DJPK memiliki peran strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJPK menyempurnakan bentuk organisasi mengingat tanggung jawab dan tantangan semakin besar dan beragam serta dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih dinamis dan mampu menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan. Berdasarkan PMK tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, memiliki tugas pokok dan fungsi:

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

A.3 NILAI KINERJA ORGANISASI

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2025 DJPK telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) DJPK Tahun 2025, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja DJPK di tahun 2025.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2025 sebesar 111,42. Pencapaian nilai NKO Tahun 2025 merupakan hasil perhitungan dari keempat perspektif dalam peta strategi DJPK tahun 2025, yaitu:

- sebesar 109,91 dari bidang *stakeholder perspective* (bobot 30%);
- sebesar 103,19 dari bidang *customer perspective* (bobot 20%);
- sebesar 113,02 dari bidang *internal business process perspective* (bobot 25%); dan
- sebesar 118,21 dari bidang *learning and growth perspective* (bobot 25%).

Tabel 1 Capaian NKO Tahun 2025

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks	Target 2024	Realisasi 2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				109,91		
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel			109,91		
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92,2	99,89	108,34	84	94,15
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	110,50%	110,50	100%	103,85%
1c-CP	Indeks integritas	100	111,04	111,04	100	106,02
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				103,19		
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat			84,16		
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	115,04	115,04	85	87,46
2b-N	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	6,10%	3,25%	53,28	-	-
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel			107,82		
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92,28%	100,30	91	91,67
3b-N	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29,50%	30,44%	103,20	-	-
3c-N	Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	80	98	120	-	-
4	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis			117,58		
4a-N	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	80%	100%	120	75	90%
4b-N	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	83,44	119,20	-	-
4c-N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	83	94,6	113,97	78	93,54

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Realisasi TW IV	Indeks	Target 2024	Realisasi 2024
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				113,02		
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas			120		
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	116,72	120	95	115,3
5b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	94,29%	120	-	-
6	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis			106,66		
6a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100	100%	100%
6b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100	100%	100%
6c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	120	120	-	-
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif			112,42		
7a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,50%	103,99	112,42	-	-
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				118,21		
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif			114,74		
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara	97,50%	113,70%	116,62	96%	112,25%
8b-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	100	108,09	108,09	100	104,48
8c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	100%	120	94%	100%
9	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif			120		
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	120	120	100	120
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120	84,10	90,06
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif			119,90		
10a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	120%	120	-	-
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,8	119,8	100	120
NILAI KINERJA ORGANISASI				111,42		

A.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu SAKTI menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.5 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sementara Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6 DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan DJPK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

A.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh DJPK yang merupakan entitas pelaporan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

1) PENDAPATAN-LRA

Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus, pengakuan pendapatan-LO pada DJPK adalah sebagai berikut:

- 2.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- 2.2 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.
- 2.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) BELANJA

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) BEBAN

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) ASET

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya:

a) ASET LANCAR

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan

diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai Aset Tetap disajikan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan BMN.

c) PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

d) ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6) KEWAJIBAN

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah

diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) EKUITAS

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8) PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan

*Piutang Tidak
Tertagih*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penentuan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penentuan Kualitas Piutang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Penentuan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;	0,5%
Kurang lancar	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;	10%
Diragukan	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2. Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada	100%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
	Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	

9) PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;
- Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat aset tetap disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

10) AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015, amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain:

- Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
- Lisensi;
- Waralaba (*Franchise*);
- Hak Cipta (*Copyright*); dan
- Hak Paten.

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan

- 2) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana Tabel 5.

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20

A.8 CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Output Strategis Selama periode Tahun Anggaran 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Agenda Pembangunan 3 (**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**) adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Capaian Kegiatan Prioritas Nasional

No.	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Rincian Output
1.	4779.UAC.201	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	832.372.000	812.421.194	97,60%	1.150 Orang	1.150 Orang	100,0%

No.	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Rincian Output
2.	4779.UBB.201	Bimtek BUMDes (PN)	1.173.505.000	1.163.024.472	99,11%	2.000 BUMDes/Desa	2.000 BUMDes/Desa	100,00%
3.	4780.UAE.201	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	456.577.000	452.380.481	99,08%	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100,0%
4.	4781.UAD.201	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	76.507.000	76.318.529	99,75%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0%

Upaya yang telah dilaksanakan pada RO Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain pelaksanaan *capacity building* pengelolaan keuangan daerah, kegiatan *coaching of coaches* Bimtek, dan bimtek secara *online* di 5 (lima) *center*.

Dalam rangka percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, dilakukan pendampingan kepada Desa/BUMDes melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Sasaran utama pendampingan adalah BUMDes di desa agar dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi desa dan pendapatan asli desa. Upaya yang telah dilaksanakan selama periode TA 2025, yaitu pelaksanaan *workshop* pendampingan BUMDes di 9 (sembilan) kampus, yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Lampung, Universitas Udayana, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Jember, Universitas Siliwangi, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Andalas, dan PKN STAN.

Dalam rangka mewujudkan Rekomendasi Kebijakan PDRD, telah dilaksanakan koordinasi untuk penyusunan basis data dan kajian dengan narasumber terkait, koordinasi pelaksanaan *diagnostic clinic* dengan Kementerian/ Lembaga terkait, dan pelaksanaan *piloting* model potensi PDRD pada 3 daerah.

Sinkronisasi TKD dan Belanja Kementerian/ Lembaga dilaksanakan melalui koordinasi bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan monev sinkronisasi TKD dan Belanja Kementerian/ Lembaga.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2025

Uraian	2025			
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Pendapatan dan Hibah				
Penerimaan Negara Bukan Pajak			286.018.345	
Rupiah Murni	74.557.269.000	76.273.823.000	39.526.087.885	51,82
Belanja Pegawai	4.080.335.000	4.424.288.000	4.041.698.000	91,35
Belanja Barang	65.428.262.000	64.262.881.000	28.503.075.888	44,35
Belanja Modal	5.048.672.000	7.586.654.000	6.981.313.997	92,02
Hibah Luar Negeri	6.500.000.000	8.167.408.000	7.776.319.751	95,21
Belanja Barang	6.050.000.000	8.003.408.000	7.623.839.751	95,26
Belanja Modal	450.000.000	164.000.000	152.480.000	92,98
Jumlah Belanja Negara	81.057.269.000	84.441.231.000	47.302.407.636	56,02

Pada DIPA awal sesuai dengan DIPA Induk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SP DIPA-015.06-0/2025 kode *digital stamp* 0440-2098-9505-1906, terdapat sumber pendanaan dari Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp81.057.269.000,00** dan telah dilakukan revisi kegiatan menjadi **Rp84.441.231.000,00** sesuai kebutuhan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Adapun rincian dana tersebut antara lain (1) pendanaan dari Rupiah Murni sebesar **Rp74.557.269.000,00** yang selanjutnya dilakukan revisi anggaran menjadi **Rp76.273.823.000,00** dan (2) pendanaan dari Hibah Luar Negeri sebesar **Rp6.500.000.000,00** yang selanjutnya dilakukan revisi anggaran menjadi **Rp8.167.408.000,00**.

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2025, pagu yang bersumber dari Rupiah Murni telah mengalami realokasi anggaran dengan mekanisme revisi DIPA. Revisi Rupiah Murni DIPA tersebut dirangkum dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan S-366/AG/AG.3/2025 tanggal 17 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2025 (Revisi Ke-2), anggaran DJPK melalui pergeseran anggaran antar-unit eselon I bertambah sebesar **Rp3.686.100.000,00**; dan
2. Sesuai dengan S-33/AG.3/2025 tanggal 7 Oktober 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2025 (Revisi Ke-7), anggaran DJPK bertambah sebesar **Rp420.000.000,00**.

Sementara itu, revisi pagu anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri sesuai dengan S-733/AG/AG.3/2025 tanggal 25 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Perimbangan Keuangan TA 2025 (Revisi Ke-6), bertambah sebesar **Rp1.667.408.000,00** dari anggaran semula sebesar **Rp6.500.000.000,00**. Sumber Anggaran Hibah luar negeri adalah hibah *Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia* (SINERGIS) dari Bank Dunia tahun 2025 dengan total anggaran setelah revisi sebesar **Rp8.167.408.000,00**.

Kegiatan hibah SINERGIS Tahun 2025 meliputi:

- a. *Interagency Coordination Meeting*
- b. *Interagency Reform Team Meeting*
- c. *Monitoring and Evaluation Site Visit*
- d. *Management Office Program*
- e. *Steering Committee Meeting*

- f. *Technical Committee Meeting*
- g. *Workshop* Peningkatan Kapasitas APIPDA selaku *Asistance Verificator Independent* atas Kinerja DAK Fisik
- h. *Adjustment Factors Workshop*
- i. *Coordination Meeting*
- j. Konsultan Pendukung Implementasi DAU *Reform*
- k. *Supervision and Monitoring Cost Central Government*
- l. *Working Group on PIP Implementation*
- m. *District Thematic Working Group*
- n. Pengembangan *Fiscal Enterprise Data Platform* SIKD dan Perluasan Pemanfaatan SIKD.

Pada tahun 2025, dilakukan efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dimaksud berupa blokir anggaran sebesar **Rp51.056.786.000,00**, yang bersumber dari Rupiah Murni, terdiri atas Belanja Barang sebesar **Rp45.342.114.000,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp5.714.672.000,00**. Selain itu, selama Tahun Anggaran 2025 terdapat pergeseran anggaran blokir ke BaTII sesuai dengan S-523/AG/AG.3/2025 tanggal 16 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2025 (Revisi Ke-3) sebesar **Rp2.389.546.000,00** dan relaksasi atas blokir dengan total sebesar **Rp12.646.066.000,00**, sehingga pagu anggaran DJPK setelah blokir maupun relaksasi blokir menjadi **Rp48.667.240.000,00**. Rincian relaksasi blokir dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan S-670/AG/AG.3/2025 tanggal 7 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2025 (Revisi Ke-5), blokir anggaran DJPK untuk belanja barang direlaksasi sebesar **Rp7.145.496.000,00**; dan
2. Sesuai dengan S-995/AG/AG.3/2025 tanggal 24 November 2025 hal Pengesahan Revisi (Relaksasi Blokir) Anggaran Unit Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2025 (Revisi Ke-9), blokir anggaran DJPK untuk belanja modal direlaksasi sebesar **Rp5.500.570.000,00**.

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP
Rp286.018.345,00

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp286.018.345,00**. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menetapkan target dalam APBN TA 2025. Realisasi PNBP pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berasal dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar **Rp201.885.812,00**, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar **Rp456.000,00**, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar **Rp83.676.533,00**. Besarnya realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 per akun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7 Realisasi PNBP untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Uraian	Estimasi	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	201.885.812
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	456.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	83.676.533
Total	0	286.018.345

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar **Rp285.281.658,00**, realisasi PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp736.687,00** atau **0,26** persen. Kenaikan ini berasal dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang meningkat dari **Rp149.454.654** pada tahun 2024 menjadi **Rp201.885.812** pada tahun 2025 akibat penambahan kuantitas BMN yang dijual dan tingginya minat beli masyarakat dalam proses lelang di tahun 2025.

Perbandingan realisasi PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	201.885.812	149.454.654	52.431.158	35,08
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	456.000	7.663.900	(7.207.900)	(94,05)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	83.676.533	113.174.828	(29.498.295)	(26,06)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	14.988.276	(14.988.276)	(100,00)
Total		286.018.345	285.281.658	736.687	0,26

B.1.1.1 PENDAPATAN DARI PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berasal dari penjualan peralatan dan mesin.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar **Rp201.885.812,00** yang berasal dari berbagai penerimaan sebagai berikut:

- Rp65.817.468,00** berasal dari penerimaan atas lelang paket BMN HBL - RL-03/07.02/2025/01 - tanggal 14 Feb 2025 – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Lelang Non Eksekusi BMN - PL: Chandra Endria Cipta Prayoga, S.E. NIP 198707072008121002 sesuai NTPN nomor 3C42B1JNG83PHF39;
- Rp80.028.044,00** berasal dari penerimaan atas Lelang paket BMN HBL - RL-666-tanggal 05 Nov 2025 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Lelang - PL Andika Putra Bharata sesuai NTPN nomor 13EFE7QLV2V01TPO; dan
- Rp56.040.300,00** berasal dari penerimaan atas Lelang paket BMN hasil Bersih Lelang - RL-768/07.02/2025/01 - tanggal 04 Dec 2025 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Lelang - PL Chandra Endria Cipta Prayoga, S.E. sesuai NTPN nomor 3D66248VVOODGLS5E.

B.1.1.2 PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU

Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) berasal dari setoran pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan uang makan pegawai.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar **Rp456.000,00** yang berasal dari berbagai penerimaan sebagai berikut:

- Rp74.000,00** berasal dari pengembalian uang makan TA 2024 a.n. Anissa Putri sesuai NTPN nomor 0B03D3CIFT5BBAR4 tanggal 9 Januari 2025;

*Pendapatan dari
Penjualan
Peralatan dan
Mesin
Rp201.885.812,00*

*Penerimaan
Kembali Belanja
Pegawai TAYL
Rp456.000,00*

- b. **Rp70.000,00** berasal dari pengembalian uang makan TA 2024 a.n. Khishbatur Rizqiyah sesuai NTPN nomor ABE1061QVCSGIDF1 tanggal 9 Januari 2025.
- c. **Rp41.000,00** berasal dari pengembalian uang makan TA 2024 a.n Ilham Hadiana sesuai NTPN nomor 4C3551JNG80IHBUN tanggal 13 Januari 2025;
- d. **Rp37.000,00** berasal dari pengembalian uang makan TA 2024 a.n Adry Purnabakti sesuai NTPN nomor 87E3F7QLV219CCGJ tanggal 13 Januari 2025;
- e. **Rp37.000,00** berasal dari pengembalian uang makan TA 2024 a.n Agustinus Wicaksono sesuai NTPN nomor 7888661QVCSGICPH tanggal 14 Januari 2025;
- f. **Rp123.000,00** berasal dari pengembalian uang makan TA 2024 a.n. Nasrullah sesuai NTPN nomor 1FD222G502IUUECS tanggal 14 Januari 2025.
- g. **Rp74.000,00** berasal dari pengembalian uang makan TA 2024 a.n. Syahdam Husein sesuai NTPN nomor 4F94961QVCVI4O2T tanggal 12 Februari 2025.

B.1.1.3 PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU

*Penerimaan
Kembali Belanja
Barang TAYL
Rp83.676.533,00*

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL adalah PNBP Lainnya yang diakibatkan oleh pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja barang yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar **Rp83.676.533,00** berasal dari berbagai penerimaan sebagai berikut:

- a. **Rp64.650.903,00** berasal dari pengembalian biaya belanja perjalanan dinas atas SPP Nomor 1712 sesuai NTPN nomor F9C9B1JNG80HFTRM tanggal 8 Januari 2025;
- b. **Rp7.015.000,00** berasal dari pengembalian belanja kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas atas SPP 1595 sesuai NTPN nomor 862D87QLV218AU1N tanggal 8 Januari 2025;
- c. **Rp4.473.800,00** berasal dari pengembalian biaya belanja perjalanan dinas atas SPP Nomor 1567 sesuai NTPN nomor 42BF961QVCSFG9Q6 tanggal 10 Januari 2025;
- d. **Rp2.471.670,00** berasal dari pengembalian biaya belanja perjalanan dinas atas SPP Nomor 1521 sesuai NTPN nomor 2D9E455DFIA34G4J tanggal 8 Januari 2025;
- e. **Rp5.037.160,00** berasal dari pengembalian biaya belanja perjalanan dinas atas SPP Nomor 1696 sesuai NTPN nomor 02DDD55DFIFUC2SB tanggal 4 Maret 2025.
- f. **Rp28.000,00** berasal dari pengembalian saldo RPATA dengan SPM Nomor SPM-440941-392289602 tanggal 9 Januari 2025.

B.2 BELANJA

*Realisasi Belanja
Rp47.302.407.636,00*

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2025 dalam DIPA sebesar **Rp84.441.231.000,00**. Nilai tersebut meningkat sebesar **Rp6.450.426.000,00** atau **8,27** persen dibandingkan pada TA 2024 yang sebesar **Rp77.990.805.000,00**.

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp47.302.407.636,00** atau **56,02** persen dari pagu Belanja dalam DIPA sebesar **Rp84.441.231.000,00**. Realisasi Belanja ini turut dipengaruhi oleh besaran blokir anggaran untuk efisiensi sebesar total **Rp36.021.174.000,00** sehingga jumlah anggaran neto yang dapat digunakan setelah dikurangi blokir sebesar **Rp48.420.057.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah dikurangi blokir untuk efisiensi, maka capaian realisasi belanja Satker DJPK Tahun 2025 sebesar **97,69** persen dari anggaran neto efisiensi.

Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Belanja	Pengembalian	Belanja Neto	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/2
Rupiah Murni	76.273.823.000	39.538.515.967	12.428.082	39.526.087.885	51,82
Belanja Pegawai	4.424.288.000	4.042.532.000	834.000	4.041.698.000	91,35
Belanja Barang	64.262.881.000	28.514.669.970	11.594.082	28.503.075.888	44,35
Belanja Modal	7.586.654.000	6.981.313.997	-	6.981.313.997	92,02
Hibah Luar Negeri	8.167.408.000	7.776.836.239	516.488	7.776.319.751	95,21
Belanja Barang	8.003.408.000	7.624.356.239	516.488	7.623.839.751	95,26
Belanja Modal	164.000.000	152.480.000	-	152.480.000	92,98
Jumlah Belanja Negara	84.441.231.000	47.315.352.206	12.944.570	47.302.407.636	56,02

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp22.880.141.757,00** atau **32,60** persen dari realisasi belanja per 31 Desember 2024 sebesar **Rp70.182.549.393,00**. Secara persentase realisasi belanja terhadap pagu belanja pun mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari **89,99** persen di TA 2024 menjadi **56,02** persen di TA 2025.

Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menurut jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perbandingan antara realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

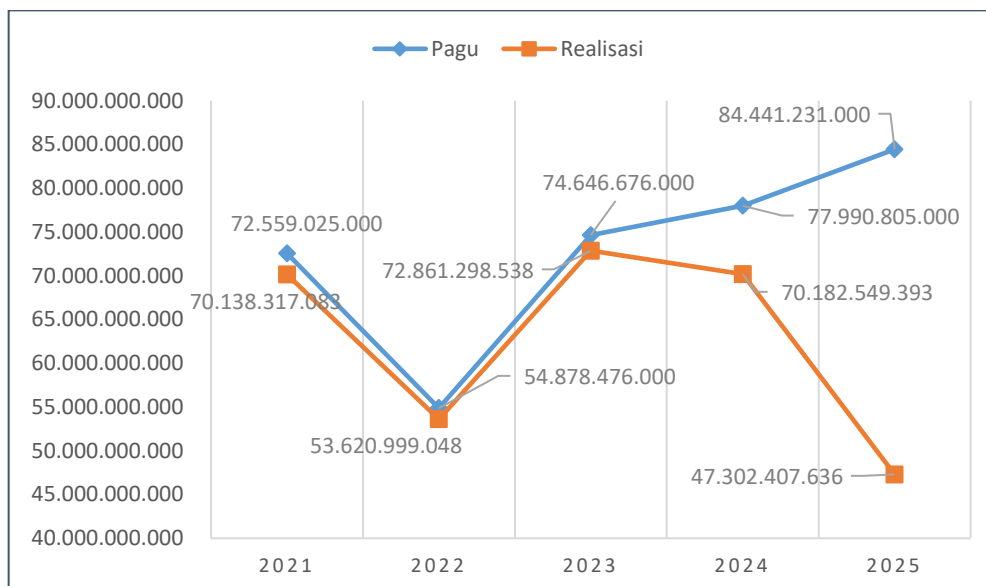
Uraian	2025		%	2024		%
	Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
Belanja Pegawai	4.424.288.000	4.041.698.000	91,35	3.691.657.000	3.662.339.000	99,21
Belanja Barang	72.266.289.000	36.126.915.639	49,99	63.907.611.000	56.241.899.346	88,01
Belanja Modal	7.750.654.000	7.133.793.997	92,04	10.391.537.000	10.278.311.047	98,91
Total	84.441.231.000	47.302.407.636	56,02	77.990.805.000	70.182.549.393	89,99

Perkembangan pagu, realisasi, dan persentase realisasi belanja TA 2021 - 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 11 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja TA 2021 - 2025

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2021	72.559.025.000	70.138.317.083	96,66
2022	54.878.476.000	53.620.999.048	97,71
2023	74.646.676.000	72.861.298.538	97,61
2024	77.990.805.000	70.182.549.393	89,99
2025	84.441.231.000	47.302.407.636	56,02

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 - 2025



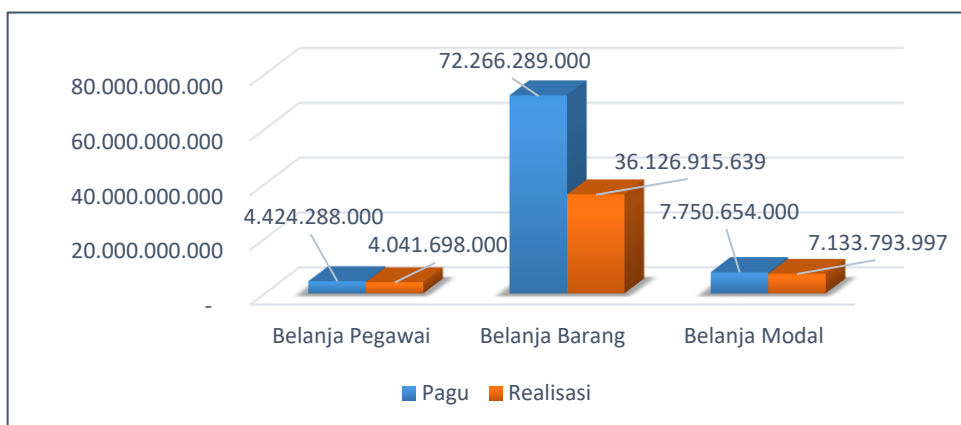
Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.424.288.000	4.041.698.000	91,35%
Belanja Barang	72.266.289.000	36.126.915.639	49,99%
Belanja Modal	7.750.654.000	7.133.793.997	92,04%
Total	84.441.231.000	47.302.407.636	56,02%

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2025 sebagaimana tampak pada tabel dan grafik berikut.

Grafik 2 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025



Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri, yang kemudian terbagi menjadi 3 program, yaitu **Program Pengelolaan Belanja Negara (CB)** sebesar **Rp28.648.902.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp10.546.585.526,00**, **Program Kebijakan Fiskal (CE)** sebesar **Rp4.247.628.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp1.662.212.545,00**, **Program Dukungan Manajemen (WA)** sebesar **Rp51.544.701.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp35.093.609.565,00**. Laporan Kinerja Unit Organisasi secara lengkap disajikan pada lampiran.

B.2.1 Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp4.041.698.000,00*

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pagu Belanja Pegawai pada DIPA TA 2025 sebesar **Rp4.424.288.000,00**, yang meliputi Belanja Uang Makan PNS dan Belanja Lembur. Sejak bulan Mei TA 2022 sampai dengan tahun berjalan, pembayaran gaji pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sudah dilakukan terpusat pada Sekretariat Jenderal seiring dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/KMK.01/2022 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/KMK.01/2022.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp4.041.698.000,00** atau **91,35** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp379.359.000,00** atau **10,36** persen. Rincian Belanja Pegawai TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Uang Makan PNS	4.029.991.000	3.724.878.000	92,43
Belanja Uang Lembur	394.297.000	316.820.000	80,35
Total	4.424.288.000	4.041.698.000	91,35

Perbandingan antara realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

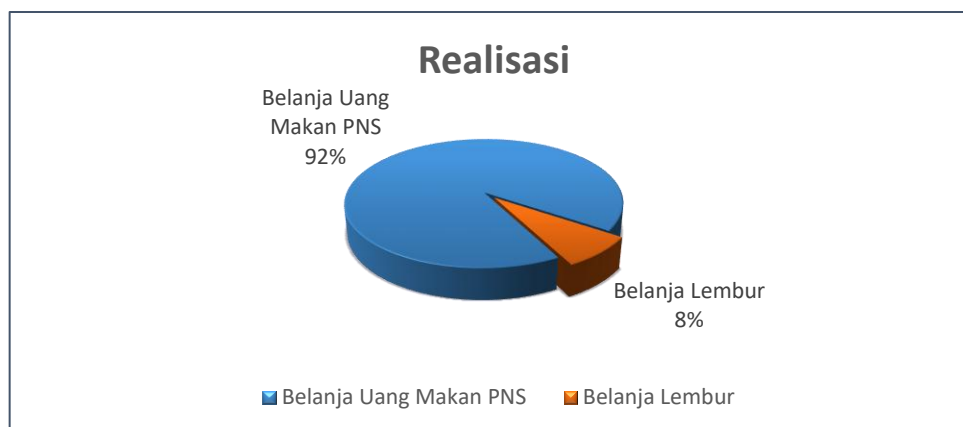
Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Uang Makan PNS	3.725.712.000	3.284.074.000	441.638.000	13,45
Belanja Uang Lembur	316.820.000	381.394.000	(64.574.000)	(16,93)
Jumlah Belanja Bruto	4.042.532.000	3.665.468.000	377.064.000	10,29
Pengembalian Belanja	834.000	3.129.000	(2.295.000)	(73,35)
Jumlah Belanja Netto	4.041.698.000	3.662.339.000	379.359.000	10,36

Di antara Belanja Pegawai tersebut, terdapat peningkatan realisasi belanja uang makan PNS sebesar **13,45** persen akibat bertambahnya pegawai yang naik pangkat/golongan dan efisiensi perjalanan dinas. Sementara itu, belanja lembur mengalami penurunan sebesar **16,93** persen.

Pelaksanaan lembur dan pengajuan uang lembur sudah terintegrasi bertahap dengan berpedoman pada ketentuan sehingga implementasi lembur menjadi lebih selektif. Adapun jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Desember tahun 2025 sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang.

Komposisi Belanja Pegawai TA 205 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 3 Komposisi Belanja Pegawai TA 2025

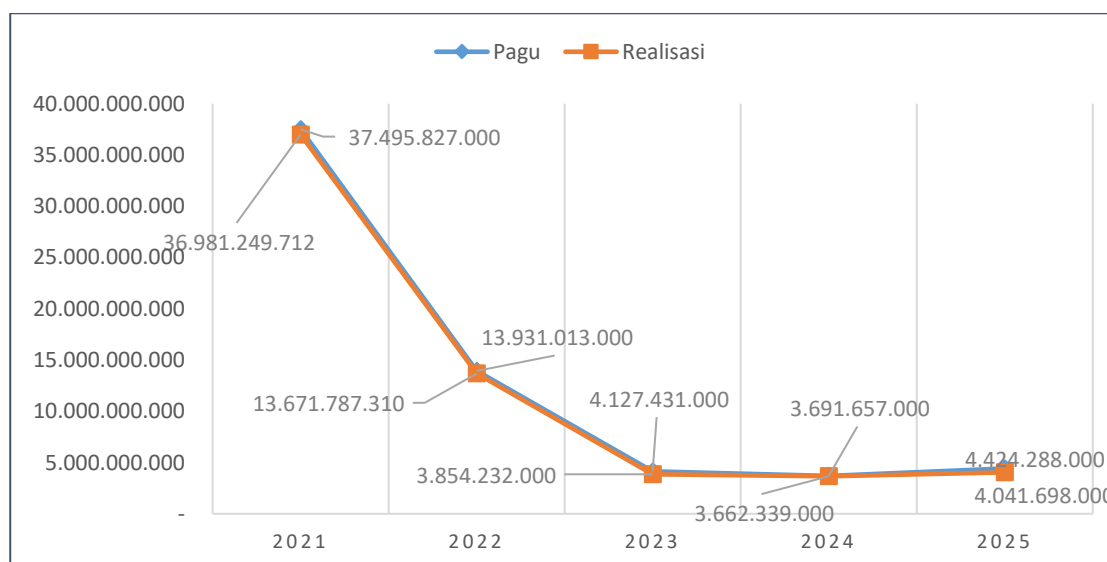


Perbandingan persentase realisasi belanja pegawai TA 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 15 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 - 2025

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2021	37.495.827.000	36.981.249.712	98,63
2022	13.931.013.000	13.671.787.310	98,14
2023	4.127.431.000	3.854.232.000	93,38
2024	3.691.657.000	3.662.339.000	99,21
2025	4.424.288.000	4.041.698.000	91,35

Grafik 4 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 - 2025



B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang
Rp36.126.915.639,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp36.126.915.639,00** yang berarti **49,99** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar **Rp72.266.289.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp20.114.983.707,00** atau **35,77** persen. Secara persentase, penurunan signifikan belanja barang terjadi pada komponen belanja perjalanan luar negeri dan dalam negeri serta belanja barang non operasional.

Rincian Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 16 Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	11.370.801.000	7.516.643.749	66,10
Belanja Barang Non Operasional	22.617.897.000	3.106.965.817	13,74
Belanja Barang Persediaan	1.050.000.000	1.048.579.808	99,86
Belanja Jasa	7.020.901.000	6.946.850.924	98,95
Belanja Pemeliharaan	6.774.599.000	6.713.013.588	99,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.432.091.000	10.794.861.753	46,07
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	0,00
Total	72.266.289.000	36.126.915.639	49,99

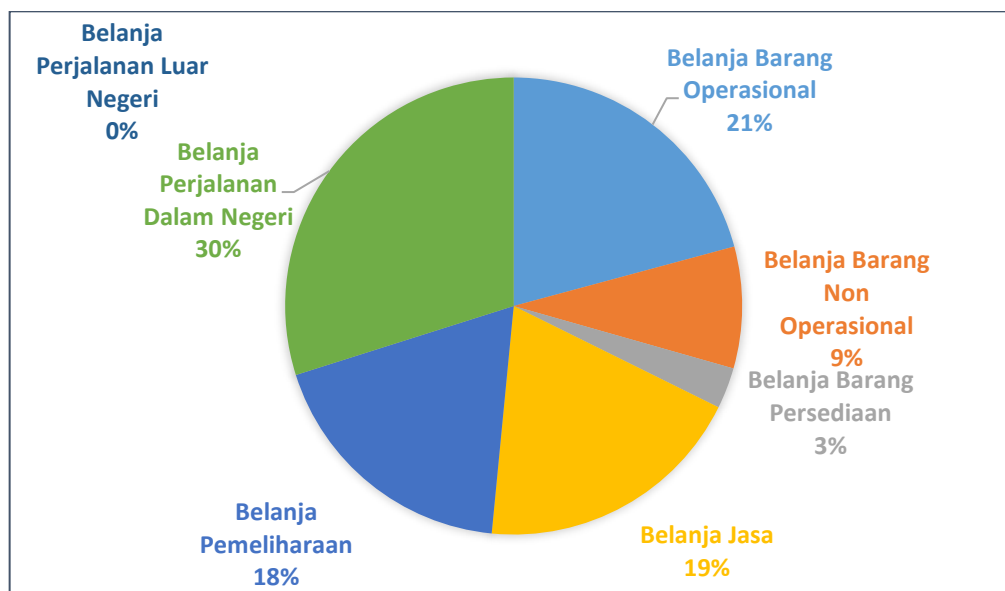
Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	7.516.713.749	8.297.221.577	(780.507.828)	(9,41)
Belanja Barang Non Operasional	3.106.965.817	6.905.504.452	(3.798.538.635)	(55,01)
Belanja Barang Persediaan	1.048.579.808	1.070.505.672	(21.925.864)	(2,05)
Belanja Jasa	6.947.967.065	7.516.372.450	(568.405.385)	(7,56)
Belanja Pemeliharaan	6.713.013.588	7.666.616.052	(953.602.464)	(12,44)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.805.786.182	24.930.162.633	(14.124.376.451)	(56,66)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	311.280.246	(311.280.246)	(100,00)
Jumlah Belanja Bruto	36.139.026.209	56.697.663.082	(20.558.636.873)	(36,26)
Pengembalian Belanja	12.110.570	455.763.736	(443.653.166)	(97,34)
Jumlah Belanja Netto	36.126.915.639	56.241.899.346	(20.114.983.707)	(35,77)

Komposisi masing-masing Realisasi Belanja Barang TA 2025 terhadap Total Realisasi dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 5 Komposisi Belanja Barang

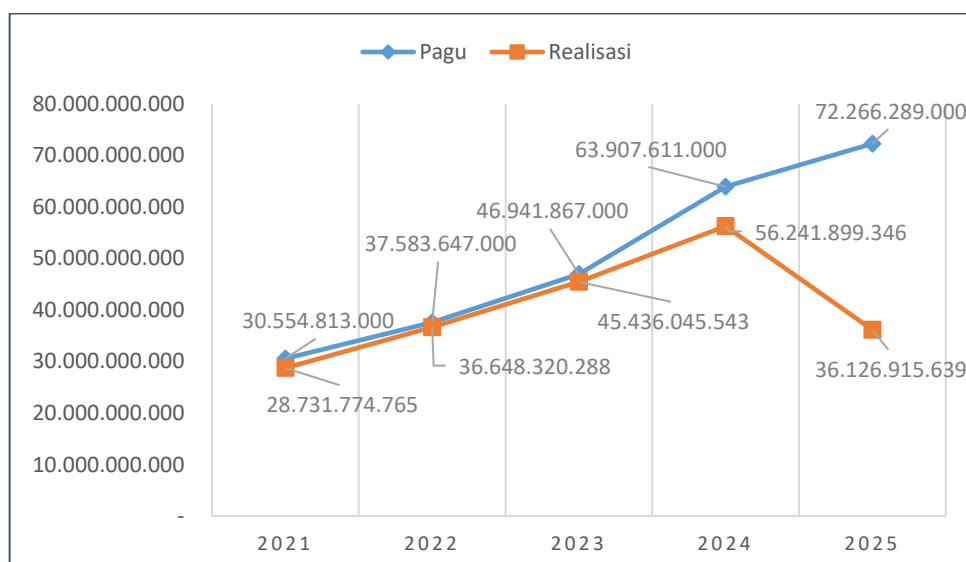


Perbandingan persentase realisasi belanja barang TA 2021 - 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2021-2025

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2021	30.554.813.000	28.731.774.765	94,03
2022	37.583.647.000	36.648.320.288	97,51
2023	46.941.867.000	45.436.045.543	96,79
2024	63.907.611.000	56.241.899.346	88,01
2025	72.266.289.000	36.126.915.639	49,99

Grafik 6 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2021-2025



B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal
Rp7.133.793.997,00

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terkait dengan pembentukan aset, baik itu aset tetap, aset lainnya, ataupun terkait kapitalisasi aset tetap.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp7.133.793.997,00** atau **92,04** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025 sebesar **Rp7.750.654.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp3.144.517.050,00** atau **30,59** persen. Penurunan Realisasi belanja modal disebabkan oleh menurunnya pagu anggaran belanja modal lainnya dan kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II, Kendaraan Fungsional Jemputan Pegawai, Meja Kerja Kayu, Kursi Besi/Metal, Camera Video, Camera Conference, Videotron, dan Lap Top.

Sementara itu, belanja modal lainnya digunakan untuk jasa konsultasi pengembangan aplikasi SIKD.

Rincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 19 Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	7.186.654.000	6.981.313.997	97,14
Belanja Modal Lainnya	564.000.000	152.480.000	27,04
Total	7.750.654.000	7.133.793.997	92,04

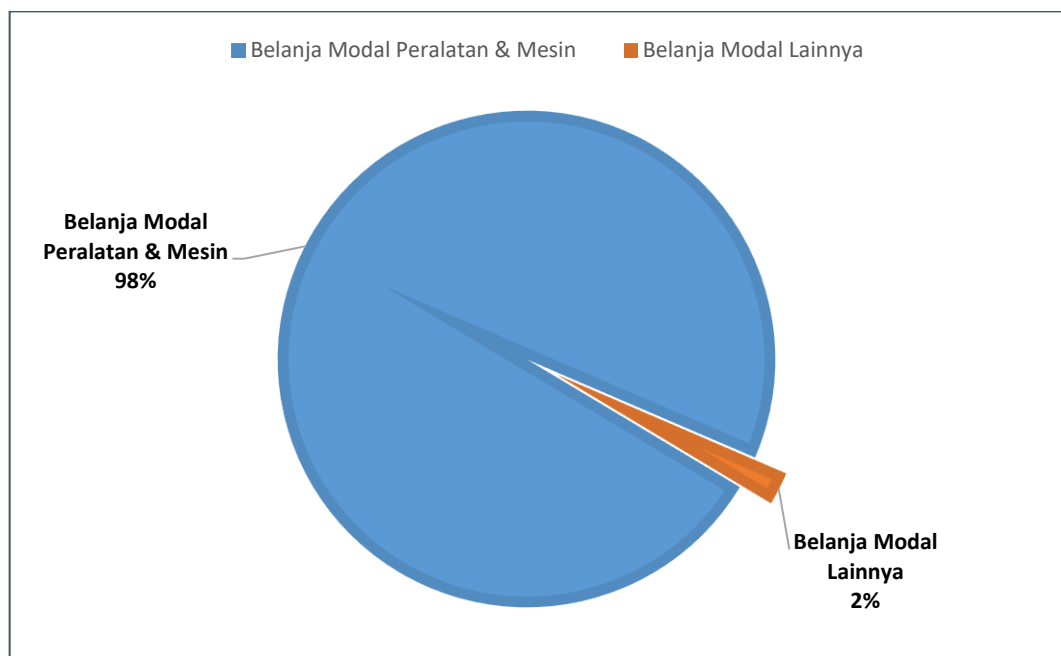
Perbandingan antara realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
B. Modal Peralatan dan Mesin	6.981.313.997	5.719.648.439	1.261.665.558	22,06
Belanja Modal Lainnya	152.480.000	4.558.662.608	(4.406.182.608)	(96,66)
Jumlah Belanja Bruto	7.133.793.997	10.278.311.047	(3.144.517.050)	(30,59)
Pengembalian Belanja	0	0	0	
Jumlah Belanja Netto	7.133.793.997	10.278.311.047	(3.144.517.050)	(30,59)

Komposisi masing-masing Realisasi Belanja Modal terhadap Total Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 7 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2025

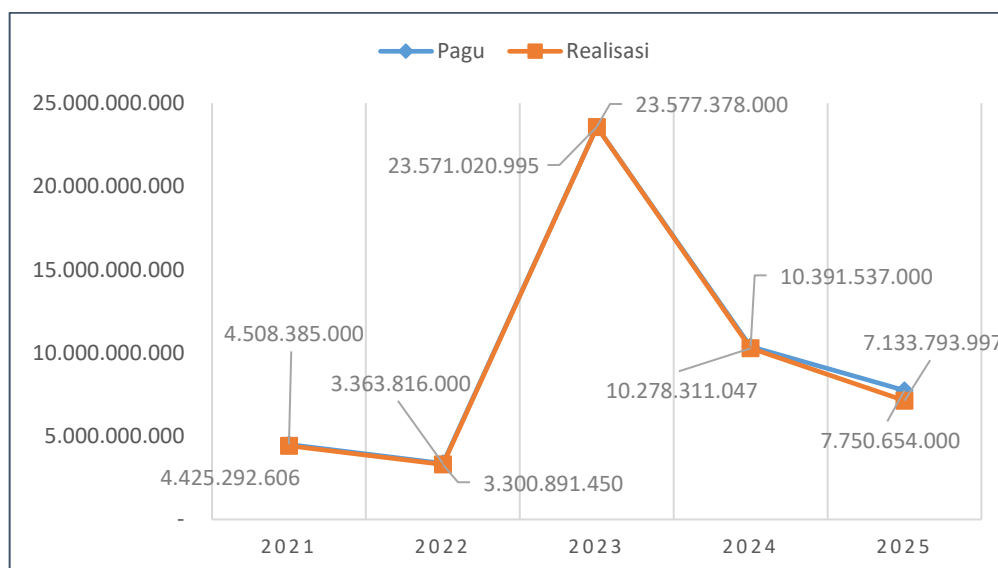


Perbandingan persentase realisasi belanja modal TA 2021 - 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 – 2025

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2021	4.508.385.000	4.425.292.606	98,16
2022	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13
2023	23.577.378.000	23.571.020.995	99,97
2024	10.391.537.000	10.278.311.047	98,91
2025	7.750.654.000	7.133.793.997	92,04

Grafik 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 - 2025



B.2.4 PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA

*Realisasi
Pengembalian
Belanja Negara
Rp12.944.570,00*

Pengembalian Belanja adalah penerimaan kembali dari kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang menjadi hak negara dan harus disetor ke Kas Umum Negara dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun dengan alasan apapun. Pengembalian Belanja berasal dari ketiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Pengembalian Belanja dibukukan sesuai dengan akun belanjanya.

Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar Rp12.944.570,00 dan Rp458.892.736,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp445.948.166,00 atau 97,18 persen. Rincian Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	Uraian Pengembalian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
5111	Belanja Uang Makan PNS	834.000	2.985.000	(2.151.000)	(72)
5122	Belanja Uang Lembur	0	144.000	(144.000)	
Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai		834.000	3.129.000	(2.295.000)	(73,35)
5211	Belanja Barang Operasional	70.000	0	70.000	
5212	Belanja Barang Non Operasional	0	12.691.000	(12.691.000)	(100,0)
5218	Belanja Barang Persediaan	0	0	0	
5221	Belanja Jasa	1.116.141	0	1.116.141	
5231	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.924.429	443.072.736	(432.148.307)	(97,5)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0	
Jumlah pengembalian Belanja Barang		12.110.570	455.763.736	(443.653.166)	(97,34)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	
5361	Belanja Modal Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pengembalian Belanja Modal		0	0	0	
Total		12.944.570	458.892.736	(445.948.166)	(97,18)

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Perbandingan
Neraca per 31
Desember 2025
dan 31
Desember 2024*

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Perbandingan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 23 Perbandingan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Perkiraan	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset	22.191.733.514	24.411.836.962	(2.220.103.448)	(9,09)
Kewajiban	883.749.985	1.299.765.029	(416.015.044)	(32,01)
Ekuitas	21.307.983.529	23.112.071.933	(1.804.088.404)	(7,81)

Penjelasan setiap pos-pos dalam Neraca sebagai berikut.

C.1 ASET

*Aset
Rp22.191.733,514,00*

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp22.191.733,514,00** dan **Rp24.411.836.962,00**, turun sebesar **Rp2.220.103.448,00** atau **9,09** persen. Penurunan nilai aset disebabkan oleh komponen aset lain-lain. Pada akhir periode 2025, nilai aset tersebut **Rp0,00** karena seluruh aset yang dihentikan penggunaannya telah dilakukan penghapusan seluruhnya.

Tabel 24 Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
Aset	22.191.733.514	24.411.836.962	(2.220.103.448)	(9,09)

Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 25 Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Perkiraan	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	1.440.149.295	1.225.743.174	214.406.121	17,49
Aset Tetap	18.891.268.737	19.712.902.522	(821.633.785)	(4,17)
Aset Lainnya	1.860.315.482	3.473.191.266	(1.612.875.784)	(46,44)
Jumlah Aset	22.191.733.514	24.411.836.962	(2.220.103.448)	(9,09)

C.1.1 ASET LANCAR

C.1.1.1 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak
Rp59.742.906,00*

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang timbul dari pungutan pendapatan Negara selain Pajak.

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp59.742.906,00** dan **Rp50.733.906,00** merupakan piutang yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak yang belum dilunasi/disetor ke kas negara sampai dengan tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Klasifikasi Piutang	Debitur	Saldo Awal	Perubahan (+/-)	Saldo Akhir 31 Desember 2025	Penggolongan				Nilai Agunan Barang Sitaan
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
PNBP	PT Mitsubishi Jaya Elevator	-	470.400	470.400	470.400	-	-	-	-
	CV Cehindo Nusantara	-	3.027.360	3.027.360	3.027.360	-	-	-	-
	PT Tabina Empat Pilar	-	3.767.540	3.767.540	3.767.540	-	-	-	-
	PT Provinces Indonesia	-	714.530	714.530	714.530	-	-	-	-
	PT Artha Raya Sejahtera	-	1.029.170	1.029.170	1.029.170	-	-	-	-
	PT Aek Sibundong Nauli	39.785.106	-	39.785.106	-	-	-	39.785.106	-
	Sdr. Sanjaya Wiratama	10.948.800	-	10.948.800	-	-	-	10.948.800	-
Jumlah Piutang		50.733.906	9.009.000	59.742.906	9.009.000	-	-	50.733.906	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih									50.778.951

Pada TA 2025, terdapat penambahan piutang bukan pajak sebesar **Rp9.009.000,00**. Piutang tersebut berasal dari pengembalian belanja barang atas kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator senilai **Rp470.400,00** atas kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Suku Cadang dan Jasa Pemasangan Tali Lift Mitsubishi dengan kode *billing* 820260430443545.
2. CV Cehindo Nusantara senilai **Rp3.027.360,00** atas kelebihan pembayaran Jasa Pemeliharaan Kanopi Teras Gazebo DJPK dengan kode *billing* 820260430443783.
3. PT Tabina Empat Pilar senilai **Rp3.767.540,00** atas kekurangan volume pekerjaan Jasa Pemeliharaan Ruang Kerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kode *billing* 820260430443656.
4. PT Provinces Indonesia senilai **Rp714.530,00** atas kelebihan pembayaran Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan *Plumbing* dengan kode *billing* 820260430443747.
5. PT Artha Raya Sejahtera senilai **Rp1.029.170,00** atas kekurangan volume pekerjaan Jasa Pemeliharaan Koridor Lift Dua Lantai Gedung Radius Prawiro dengan kode *billing* 820260430443705.

Atas piutang tersebut, telah dilakukan pengembalian ke kas negara pada tanggal 1 Mei 2026 sesuai kode *billing* di atas.

Berdasarkan surat PUPN Cabang DKI Jakarta nomor PSBDT-581/PUPNC.10.05/2024 piutang macet Sdr. Sanjaya Wiratama senilai **Rp10.948.800,00** telah ditetapkan oleh PUPN sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) pada tanggal 6 Desember 2024. Pengurusan piutang macet Sdr. Sanjaya Wiratama diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui surat Menteri Keuangan nomor S-161/MK.1/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan diterima PUPN Cabang DKI Jakarta melalui surat nomor SP3N-411/PUPNC.10.05/2014 tanggal 11 November 2014. Sebagai tindak lanjut atas piutang yang dinyatakan PSBDT, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah mengajukan usulan penghapusan piutang Sdr. Sanjaya Wiratama secara bersyarat melalui nota dinas kepada Sekretaris Jenderal nomor ND-2/PK/2025 tanggal 2 Januari 2025, dan telah diusulkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-9/MK.1/2025 tanggal 13 Januari 2025.

Sementara piutang macet PT. Aek Sibundong Nauli senilai **Rp39.785.106,00** yang juga diserahkan kepada PUPN melalui surat Menteri Keuangan nomor S-161/MK.1/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan diterima PUPN Cabang DKI Jakarta melalui surat nomor SP3N-14/PUPNC.10.05/2014 tanggal 26 Juni 2014, masih dalam proses penagihan oleh KPKNL Jakarta V dengan status terakhir telah disampaikan surat paksa melalui Laporan Pemberitahuan Surat Paksa nomor LapSP-98/WKN.07/KNL.05.04/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan melalui Surat Pemberitahuan *Crash Program* Penyelesaian Utang nomor S-391/KNL/07.05/2022 tanggal 14 April 2022.

C.1.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Rp50.778.951,00*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp50.778.951,00** dan **Rp50.733.906,00** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar **Rp50.778.951,00**, terdiri dari penyisihan atas piutang dengan status lancar sebesar **Rp45.045,00** dan piutang

macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan status piutang macet sebesar **Rp50.733.906,00**.

C.1.1.3. Persediaan

Persediaan
Rp1.431.185.340,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp1.431.185.340,00** dan **Rp1.225.743.174,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp205.442.166,00** atau **16,76** persen. Peningkatan nilai persediaan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan barang persediaan pada periode sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per jenis persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
117111	Barang Konsumsi	1.394.248.926	1.176.426.414	217.822.512,0	18,52
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	36.936.414	49.316.760	(12.380.346)	(25,10)
Total		1.431.185.340	1.225.743.174	205.442.166,0	16,761

Tabel 28 Mutasi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

Saldo Awal 1 Januari 2025	1.225.743.174
Mutasi Tambah	1.105.838.356
Pembelian	1.105.823.315
Hasil Opname Fisik	15.041
Mutasi Kurang	900.396.190
Habis Pakai	900.396.190
Saldo per 31 Desember 2025	1.431.185.340

C.1.2 ASET TETAP

Aset Tetap
Rp18.300.712.779,00

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah/ dalam kegiatan operasional entitas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp18.891.268.737,00** dan **Rp19.712.902.522,00**. Rincian aset tetap menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 29 Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	122.200.212.337	115.634.548.845	6.565.663.492	5,68
2	Gedung dan Bangunan	1.427.595.200	1.427.595.200	0	0,00
3	Aset Tetap Lainnya	1.054.349.217	669.888.518	384.460.699	57,39
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(105.514.420.414)	(97.781.683.712)	(7.732.736.702)	7,91
6	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(276.467.603)	(237.446.329)	(39.021.274)	16,43
Jumlah		18.891.268.737	19.712.902.522	(821.633.785)	(4,17)

Posisi aset tetap pada neraca antara Modul GLP dan Modul Aset Tetap pada SAKTI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30 Daftar Perbandingan Aset Tetap di Modul GLP dan Modul Aset per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Modul GLP	Modul Aset	Selisih
1	Peralatan dan Mesin	122.200.212.337	122.200.212.337	0
2	Gedung dan Bangunan	1.427.595.200	1.427.595.200	0
3	Aset Tetap Lainnya	1.054.349.217	1.054.349.217	0
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(105.514.420.414)	(105.514.420.414)	0
6	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(276.467.603)	(276.467.603)	0
Jumlah		18.891.268.737	18.891.268.737	0

C.1.2.1. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp122.200.212.337,00*

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp122.200.212.337,00** dan **Rp115.634.548.845,00**. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar **Rp6.565.663.492,00** atau **5,68** persen.

Tabel 31 Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	122.200.212.337	115.634.548.845	6.565.663.492	5,68
Jumlah	122.200.212.337	115.634.548.845	6.565.663.492	5,68

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar **Rp7.843.008.497,00** terdiri dari :

- Pembelian Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II, Kendaraan Fungsional Jemputan Pegawai, Meja Kerja Kayu, Kursi Besi/Metal, Camera Video, Camera Conference, Videotron, dan Lap Top.
- Transfer masuk Lap Top Sekretariat Jenderal hasil dari pengadaan Barang Milik Negara terkonsolidasi dan transfer masuk Sedan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kendaraan Dinas Jabatan Eselon I.

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar **Rp1.277.345.005,00** terdiri dari :

- Penghentian Aset dari Penggunaan terhadap aset yang dilakukan penghapusan.
- Transfer Keluar Aset Kendaraan Dinas Jabatan Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran.

Tabel 32 Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 1 Januari 2025	115.634.548.845
Mutasi Tambah	7.843.008.497
Pembelian	6.981.313.997
Transfer Masuk	861.694.500
Mutasi Kurang	1.277.345.005
Transfer Keluar	626.554.500
Penghentian Aset Dari Penggunaan	650.790.505
Saldo 31 Desember 2025	122.200.212.337
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	105.514.420.414
Nilai Buku per 31 Desember 2025	16.685.791.923

Rincian Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 33 Rincian Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Kelompok Barang	Nilai
ALAT BANTU	10.219.160.397
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	17.186.319.676
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	31.071.800
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	15.296.190
ALAT UKUR	31.500.000
ALAT KANTOR	10.765.508.630
ALAT RUMAH TANGGA	19.079.750.802
ALAT STUDIO	2.246.125.266
ALAT KOMUNIKASI	321.638.054
PERALATAN PEMANCAR	46.860.000
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	3.850.000
ALAT KEDOKTERAN	5.934.500
UNIT ALAT LABORATORIUM	1.985.540.450
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	13.624.000
KOMPUTER UNIT	14.797.044.670
PERALATAN KOMPUTER	45.013.852.102
ALAT KERJA PENERBANGAN	59.600.000
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	377.535.800
Peralatan dan Mesin	122.200.212.337

C.1.2.2. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp1.427.595.200,00*

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp1.427.595.200,00** dan **Rp1.427.595.200,00** yang merupakan aset tetap berupa 1

(satu) unit Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen. Rumah Negara atau rumah dinas tersebut berlokasi di Jalan Cipete V No. 8a, RT.1/RW.4, Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410.

C.1.2.3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp1.054.349.217,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp1.054.349.217,00** dan **Rp669.888.518,00**. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar **Rp384.460.699,00**, dengan rincian perubahan sebagai berikut.

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp590.555.958,00** berupa:

- Aset Tetap Renovasi. Penambahan dilakukan melalui pembangunan kanopi teras gazebo senilai **Rp192.818.821,00** dan pemeliharaan ruang kerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah senilai **Rp397.737.137,00**. Kedua renovasi tersebut memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap. Mengingat renovasi dilakukan pada gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang merupakan milik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, maka dibukukan sebagai Aset Tetap Renovasi. Hal ini tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan BA.015.6 Tahun 2025.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp206.095.259,00** berupa penghapusan aset tetap lainnya yang terdiri dari:

- CD/VCD/DVD/LD senilai **Rp3.430.000**. Penghapusan dilakukan melalui pemusnahan dengan pertimbangan kondisi aset yang telah rusak secara teknologi dan tidak dapat digunakan kembali dalam menunjang kegiatan perkantoran.
- Koleksi buku perpustakaan senilai **Rp202.665.259**. Penghapusan dilakukan melalui mekanisme penghapusan karena sebab-sebab lain. Hal ini didasarkan pada hasil sensus Barang Milik Negara yang menunjukkan bahwa fisik barang tersebut sudah tidak ditemukan lagi.

Tabel 34 Mutasi / Perubahan Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal 1 Januari 2025	669.888.518
Mutasi Tambah	590.555.958
Perolehan Lainnya	590.555.958
Mutasi Kurang	206.095.259
Penghentian Aset Dari Penggunaan	206.095.259
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.054.349.217

Rincian Daftar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut

Tabel 35 Rincian Daftar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Kelompok Barang	Nilai
ASET TETAP RENOVASI	590.555.958
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	463.793.259
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-
Aset Tetap Lainnya	1.054.349.217

C.1.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap*
Rp105.790.888.017,0
0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing **Rp105.790.888.017,00** dan **Rp98.019.130.041,00**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	122.200.212.337	105.514.420.414	16.685.791.923
2	Gedung dan Bangunan	1.427.595.200	276.467.603	1.151.127.597
3	Aset Tetap Lainnya	463.793.259	-	463.793.259
Jumlah		124.091.600.796	105.790.888.017	18.300.712.779

C.1.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp1.860.315.482,00

Jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp1.860.315.482,00** dan **Rp3.473.191.266,00**. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar **Rp1.612.875.784,00** atau **46,44** persen karena penurunan Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain, dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya (RPATA) pada akhir tahun.

Tabel 37 Perbandingan Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
Aset Lainnya	1.860.315.482	3.473.191.266	(1.612.875.784)	(46,44)

C.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp11.457.396.464,00

Jumlah Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp11.457.396.464,00** dan **Rp13.454.416.464,00**.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud (ATB) pada DJPK berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tabel 38 Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software	10.585.791.248	12.582.811.248	(1.997.020.000)	(15,87)
Lisensi	871.605.216	871.605.216	0	0,00
Jumlah	11.457.396.464	13.454.416.464	(1.997.020.000)	(14,84)

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud sebagaimana disajikan pada tabel berikut berupa:

- Pengembangan Nilai Aset (langsung) Aplikasi SIKD

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud sebagaimana disajikan pada tabel berikut berupa:

- Transfer Keluar Software Komputer kepada Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Kementerian Keuangan.

Tabel 39 Mutasi / Perubahan Aset Tak Berwujud

Saldo Awal 1 Januari 2025	13.454.416.464
Mutasi Tambah	152.480.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	152.480.000
Mutasi Kurang	2.149.500.000
Transfer Keluar	2.149.500.000
Saldo 31 Desember 2025	11.457.396.464

C.1.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp954.513.675,00*

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp954.513.675,00** dan **Rp1.236.983.804,00**. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Adapun pelaksanaan RPATA pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 40 Pelaksanaan RPATA

Jenis Transaksi	Nilai Total	Keterangan
Pengisian RPATA	954.513.675	Pengisian RPATA atas kontrak
Pembayaran kepada pihak ketiga	(883.749.985)	Dibayarkan pada tahun 2026
Penihilan RPATA	(70.763.690)	Dilakukan pada tahun 2026
Saldo	0	Nihil

C.1.3.3. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain
Rp0,00*

Jumlah Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp8.420.095.510,00**. Aset Lain-lain tersebut merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional DJPK serta dalam proses penghapusan dari BMN. Penurunan Aset lain-lain tersebut disebabkan oleh penghapusan yang dilakukan pada tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. KMK No. 1/KM.7/PK.1/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 13 Maret 2025;
2. KMK No. 2/MK/PK.1/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 9 Mei 2025;
3. KMK No. 3/MK/PK.1/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 16 Mei 2025;
4. KMK No. 6/MK/PK.1/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 19 Oktober 2025;
5. KMK No. 7/MK/PK.1/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 2 Desember 2025;
6. KMK No. 8/MK/PK.1/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 17 Desember 2025;

Tabel 41 Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8.420.095.510	(8.420.095.510)	(100,00)
Total	0	8.420.095.510	(8.420.095.510)	(100,00)

C.1.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp10.551.594.657,00*

Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing - masing sebesar **Rp10.551.594.657,00** dan **Rp19.638.304.512,00** terjadi penurunan sebesar **Rp9.086.709.855,00** atau **46,27** persen. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-
2	Software	10.585.791.248	10.083.481.936	502.309.312
3	Lisensi	871.605.216	468.112.721	403.492.495
Jumlah		11.457.396.464	10.551.594.657	905.801.807

C.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp883.749.985,00*

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp883.749.985,00** dan **Rp1.299.765.029,00**.

Tabel 43 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	883.749.985	1.299.765.029	(416.015.044)	(32,01)

Nilai Utang Kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 merupakan Utang yang berasal dari reklasifikasi atas Utang Yang Belum Diterima Tagihannya yang terbentuk dari perekaman BAST RPATA Pembayaran Pihak Ketiga sebesar **Rp.883.749.985,00** dimana penyelesaian pembayaran melalui RPATA dilakukan pada tahun berikutnya. BAST menggunakan mekanisme RPATA sebagai berikut:

1. Pembayaran Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0163/PPK/DJPK/2025 Tanggal 31-12-2025 sebesar **Rp9.047.000,00**.

2. Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Mesin Fotokopi Digital Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0174/PPK/DJPK/2025 Tanggal 31-12-2025 sebesar **Rp.47.550.000,00**.
3. Pembayaran Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Putih dan Biru Serta Atribut Jaket Kemenkeu TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0166/PPK/DJPK/2025 Tanggal 30-12-2025 sebesar **Rp602.563.500,00**.
4. Pembayaran Jasa Penyewaan dan Pemeliharaan Tanaman dan Akuarium Penghias Ruangan Gedung Radius Prawiro TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0164/PPK/DJPK/2025 Tanggal 31-12-2025 sebesar **Rp17.045.160,00**.
5. Pembayaran Jasa Pemeliharaan Koridor Lift Dua Lantai Gedung Radius Prawiro TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0167/PPK/DJPK/2025 Tanggal 31-12-2025 sebesar **Rp127.206.222,00**.
6. Pembayaran Jasa Pembasmian Dan Pengendalian Hama TA 2025 Gedung Radius Prawiro sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0165/PPK/DJPK/2025 Tanggal 31-12-2025 sebesar **Rp8.476.360,00**.
7. Pembayaran Jasa Penyimpanan Arsip Milik DJPK secara Off-Site Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0160/PPK/DJPK/2025 Tanggal 31-12-2025 sebesar **Rp20.095.561,00**.
8. Pembayaran Jasa Pemeliharaan Mesin Lift Merek Mitsubishi Gedung Radius Prawiro DJPK TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0155/PPK/DJPK/2025 Tanggal 31-12-2025 sebesar **Rp51.766.182,00**.

C.3 EKUITAS

Ekuitas
Rp21.307.983.529,00

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar **Rp21.307.983.529,00** bila dibandingkan dengan jumlah per 31 Desember 2024 yaitu **Rp23.112.071.933,00**, mengalami penurunan sebesar **Rp1.804.088.404,00** atau **7,81** persen. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan PNB
Rp0,00

Jumlah Pendapatan PNB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai
Rp3.980.907.000,00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp3.980.907.000,00** dan **Rp3.723.130.000,00**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp257.777.000,00** atau **6,92** persen karena adanya kenaikan pangkat/golongan pegawai dan efisiensi belanja perjalanan dinas. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 44 Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Uang Makan PNS	3.664.087.000	3.341.880.000	322.207.000	9,64
Beban Uang Lembur	316.820.000	381.250.000	(64.430.000)	(16,90)
Jumlah	3.980.907.000	3.723.130.000	257.777.000	6,92

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp830.757.296,00

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar *Rp830.757.296,00* dan *Rp1.162.800.484,00*. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar *Rp332.043.188,00* atau *28,56* persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan barang persediaan oleh pegawai.

Tabel 45 Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Persediaan	830.757.296	1.162.800.484	(332.043.188)	(28,56)
Jumlah	830.757.296	1.162.800.484	(332.043.188)	(28,6)

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp48.261.083.846,00

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar *Rp48.261.083.846,00* dan *Rp43.089.664.897,00*. Nilai tersebut meningkat sebesar *Rp5.171.418.949,00* atau *12,0* persen akibat kenaikan belanja jasa konsultan yang didanai dari penerimaan hibah langsung. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 46 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Keperluan Perkantoran	7.170.995.069	7.686.539.667	(515.544.598)	(6,71)
Beban Pengiriman Surat Dinas dan Pos Pusat	20.718.680	48.858.910	(28.140.230)	(57,59)
Beban Honor Operasional Satker	324.930.000	329.758.000	(4.828.000)	(1,46)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	232.065.000	(232.065.000)	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-	
Beban Bahan	2.903.506.817	6.077.068.907	(3.173.562.090)	(52,22)

Uraian Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Honor Output Kegiatan	60.700.000	227.520.000	(166.820.000)	(73,32)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	142.759.000	588.224.545	(445.465.545)	(75,73)
Beban Langganan Telepon	97.515.333	178.931.491	(81.416.158)	(45,50)
Beban Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-	
Beban Jasa Konsultan	33.213.354.605	20.814.761.094	12.398.593.511	59,57
Beban Sewa	1.006.392.832	1.072.759.533	(66.366.701)	(6,19)
Beban Jasa Profesi	1.230.936.000	1.825.602.480	(594.666.480)	(32,57)
Beban Jasa Lainnya	2.089.275.510	4.007.575.270	(1.918.299.760)	(47,87)
Jumlah	48.261.083.846	43.089.664.897	5.171.418.949	12,00

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan
Rp6.055.065.286,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal (termasuk beban persediaan bahan untuk pemeliharaan).

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar *Rp6.055.065.286,00* dan *Rp7.665.466.271,00*. Nilai tersebut menurun sebesar *Rp1.610.400.985,00* atau *21,01* persen. Penurunan tersebut terjadi karena adanya kebijakan efisiensi pada tahun 2025 sehingga pagu untuk pemeliharaan menjadi turun serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada pelaksanaan. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 47 Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.323.109.452	1.775.753.268	(452.643.816)	(25,49)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.662.331.981	4.883.952.794	(221.620.813)	(4,54)
Beban Pemeliharaan Jaringan				
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	906.750.000	(906.750.000)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	69.623.853	99.010.209	(29.386.356)	(29,68)
Jumlah	6.055.065.286	7.665.466.271	(1.610.400.985)	(21,01)

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas
Rp10.794.861.753,00

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar *Rp10.794.861.753,00* dan *Rp24.798.370.143,00*. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar *Rp14.003.508.390,00* atau *56,47* persen karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 48 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	10.554.397.896	18.169.691.226	(7.615.293.330)	(41,91)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.463.857	152.630.489	87.833.368	57,55
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	3.766.074.908	(3.766.074.908)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	2.398.693.274	(2.398.693.274)	(100,00)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	311.280.246	(311.280.246)	(100,00)
Jumlah	10.794.861.753	24.798.370.143	(14.003.508.390)	(56,47)

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp9.226.129.134,00*

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sementara Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp9.226.129.134,00** dan **Rp11.926.855.784,00**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp2.700.726.650,00** atau **22,64** persen, terutama pada Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 49 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.383.847.205	9.734.291.635	(1.350.444.430)	(13,87)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.021.274	39.021.274	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	1.575.750	(1.575.750)	100,00
Jumlah Penyusutan	8.422.868.479	9.774.888.659	(1.352.020.180)	(13,83)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	803.260.655	2.151.967.125	(1.348.706.470)	(62,67)
Jumlah Amortisasi	803.260.655	2.151.967.125	(1.348.706.470)	(62,67)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.226.129.134	11.926.855.784	(2.700.726.650)	(22,64)

D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

*Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Rp45.045,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp45.045,00** dan minus **Rp74.941,00**. Terdapat kenaikan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar **Rp119.986,00** atau **160,11** persen. Penambahan beban tersebut berkaitan dengan piutang bukan pajak atas pengembalian belanja barang akibat kekurangan volume pekerjaan pada tahun 2025. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 50 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian Jenis Beban	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	45.045	(74.941)	119.986	(160,11)
Jumlah	45.045	(74.941)	119.986	(160,11)

D.9 KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp4.355.084,00*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 51 Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Kegiatan Non Operasional		
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar	201.885.812	149.454.654
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	281.635.261	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(79.749.449)	149.454.654
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84.104.533	115.723.344
Beban Dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	84.104.533	115.723.344
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	4.355.084	265.177.998

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp84.104.533,00** berasal dari Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar **Rp456.000,00** dan Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar **Rp83.648.533,00**.

D.10 PENJELASAN PERBEDAAN LO DAN LRA

Laporan Operasional disusun berdasarkan Neraca Percobaan Akrua (NPA), sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Neraca Percobaan Kas (NPK). Perbedaan antara keduanya dapat disebabkan adanya pencatatan transaksi secara akrual dan pencatatan transaksi pada rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA).

- Perbedaan pada Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan Pengembalian RPATA TAYL (TA 2024) yang tidak dicatat pada LO sebagai Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu melainkan mengurangi akun Dana di Rekening Penampungan sebesar **Rp28.000,00**.
- Perbedaan pada Beban Uang Makan PNS merupakan Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (212111) berupa pembayaran uang makan PNS tgl 21 s.d. 31 Desember 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 sebesar **Rp.60.791.000.00**. Beban tersebut telah diakui

- sebagai penyesuaian akrual pada 31 Desember 2024 dan telah dilakukan jurnal balik saat pembayaran di tahun 2025.
3. Perbedaan pada Beban Langganan Telepon sebesar **Rp2.018.225,00** disebabkan beban atas pemakaian tahun 2024 dan telah diakui pada 31 desember 2024 sebagai penyesuaian akrual. Selanjutnya telah dilakukan jurnal balik saat pembayaran di tahun 2025.
 4. Perbedaan pada Beban Jasa Konsultan sebesar **Rp30.692.641.581,00** merupakan pengesahan hibah Langsung yang terdiri dari:
 - Hibah Langsung Jasa “Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)” dari Pemerintah Australia dengan nomor register 27BMXZ9A sesuai BAST Nomor: 02/BAST-KEMENKEU/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 pada periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025 sebesar **Rp14.238.767.660,00** yang disahkan dalam SPTMHL Nomor: PYT-29/PK.1/2025 tanggal 19 Maret 2025, dan nomor : 03/BAST-KEMENKEU/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 untuk kegiatan periode 1 Juli 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar **Rp12.607.383.811,00** yang disahkan dalam PYT-85/PK.1/2025 tanggal 29 September 2025.
 - Hibah Langsung Jasa “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT)” dari *United States Agency for International Development (USAID)* atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dengan nomor register 2F5GEXNA pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 sebesar **Rp3.846.490.110,00** yang disahkan dalam SP3HL Nomor: PRIN-134/PK.1/2025 tanggal 31 Juli 2025.
 5. Perbedaan pada Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin sebesar **Rp70.763.690,00** merupakan selisih antara pengisian RPATA dan pembayaran kepada pihak ketiga atas Jasa Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Gedung DJPK TA 2025 sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-0163/PPK/DJPK/2025 Tanggal 31 Desember 2025.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp23.112.071.933,00

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp23.112.071.933,00** dan **Rp26.442.894.850,00**. Nilai ekuitas berasal dari nilai ekuitas akhir pada 31 Desember 2024.

Tabel 52 Perbandingan Nilai Ekuitas Awal

2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
23.112.071.933	26.442.894.850	(3.330.822.917)	(12,60)

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO Rp
Rp79.144.494.276,00)

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar minus **Rp79.144.494.276,00** dan minus **Rp92.101.034.640,00**.

Tabel 53 Perbandingan Surplus/Defisit LO

2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
(79.144.494.276)	(92.101.034.640)	12.956.540.364	(14,07)

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Tidak ada Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 202 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi antar
Entitas Rp
Rp77.340.405.872,00*

Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp77.340.405.872,00** dan **Rp88.770.211.723,00**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp11.429.805.851,00** atau **12,88** persen, terutama pada Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 54 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	47.302.407.636	70.182.549.393,0	(22.880.141.757)	(32,60)
Diterima dari Entitas Lain	(286.018.345)	(285.281.658)	(736.687)	0,26
Transfer Keluar	(605.625.000)	(1.841.360.856)	1.235.735.856,0	(67,11)
Transfer Masuk	237.000.000	330.933.750,0	(93.933.750)	(28,38)
Pengesahan Hibah Langsung	30.692.641.581	20.383.371.094,0	10.309.270.487,0	50,58
Jumlah	77.340.405.872	88.770.211.723	(11.429.805.851)	(77,3)

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Kementerian/Lembaga yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar [Rp\(286.018.345,00\)](#) dan DKEL sebesar [Rp47.302.407.636,00](#).

E.5.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk (TK/TM) merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan pengalihan penggunaan BMN dengan nilai sebesar [Rp237.000.000,00](#). Adapun pengalihan penggunaan BMN tersebut antara lain:

- a. pengalihan penggunaan BMN Sekretariat Jenderal hasil dari pengadaan Barang Milik Negara terkonsolidasi untuk 30 unit Laptop; dan
- b. pengalihan BMN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa 1 (satu) unit Sedan.

Transfer Keluar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan pengalihan penggunaan BMN dengan nilai sebesar [Rp\(605.625.000\)](#). Adapun pengalihan tersebut antara lain:

- a. pengalihan BMN dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Badan Teknologi Informasi Dan Intelijen Keuangan yaitu berupa 2 (dua) unit software komputer; dan
- b. pengalihan BMN dari DJPK ke Direktorat Jenderal Anggaran berupa 1 (satu) unit Sedan.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Nilai pengesahan hibah langsung per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar sebesar [Rp30.692.641.581,00](#). dan [Rp20.383.371.094,00](#). Pengesahan hibah langsung per 31 Desember 2025 untuk SKALA dilakukan dengan SPM Pengesahan Nomor 180A tanggal 4 April 2025 dan 00652A tanggal 3 November 2025 dan untuk yang dilaksanakan ERAT dilakukan dengan SPM Pengesahan nomor 421A tanggal 26 September 2025 sebagai berikut:

- Hibah Langsung Jasa “Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)” dari Pemerintah Australia dengan nomor register 27BMXZ9A sesuai BAST Nomor: 02/BAST-KEMENKEU/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 pada periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025 sebesar [Rp14.238.767.660,00](#) yang disahkan dalam SPTMHL Nomor: PYT-29/PK.1/2025 tanggal 19 Maret 2025, dan nomor : 03/BAST-KEMENKEU/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 untuk kegiatan periode 1 Juli 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar [Rp12.607.383.811,00](#) yang disahkan dalam PYT-85/PK.1/2025 tanggal 29 September 2025.

- Hibah Langsung Jasa “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT)” dari *United States Agency for International Development* (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dengan nomor register 2F5GEXNA pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 sebesar **Rp3.846.490.110,00** yang disahkan dalam SP3HL Nomor: PRIN-134/PK.1/2025 tanggal 31 Juli 2025.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp21.307.983.529,00** dan **Rp23.112.071.933,00**.

Ekuitas Akhir

Rp21.307.983.529,00

Tabel 55 Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir

2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
21.307.983.529	23.112.071.933	(1.804.088.404)	(7,81)

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.1.1 Penyelesaian Piutang Bukan Pajak

- Nilai Piutang bukan pajak sebesar **Rp9.009.000,00** telah diselesaikan pembayarannya melalui setoran ke Kas Negara pada tanggal 1 Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Penyelesaian Utang Kepada Pihak Ketiga Melalui Pemotongan SPM

Debitur	Jumlah	Kode Billing
PT Mitsubishi Jaya Elevator	470.400	820260430443545
CV Cehindo Nusantara	3.027.360	820260430443783
PT Tabina Empat Pilar	3.767.540	820260430443656
PT Provinces Indonesia	714.530	820260430443747
PT Artha Raya Sejahtera	1.029.170	820260430443705

F.1.2 Pengakuan Aset Tetap Renovasi

- Sebagai tindak lanjut rekomendasi atas konsep temuan pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan jurnal koreksi pada tanggal 31 Desember 2025 untuk mengakui Aset Tetap Renovasi atas temuan kesalahan klasifikasi dari akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (kode akun 521121) menjadi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (kode akun 533121) senilai **Rp590.555.958,00**.

F.1.3 Penyelesaian Utang Kepada Pihak Ketiga

- Nilai Utang Kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.883.749.985,00** telah diselesaikan pembayarannya melalui SPM pada tanggal 6 dan 8 Januari 2026 dan SP2D pada sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Penyelesaian Utang Kepada Pihak Ketiga Melalui Pemotongan SPM

Jenis Tagihan	Nomor SPP	Tanggal SPP	No SPM	Tanggal SPM	No. SP2D	Tanggal SP2D	Belanja	Potongan Pendapatan	Nilai SP2D
Pembayaran RPATA	00009T	08-01-2026	00009A	09-01-2026	260190000001600	12-01-2026	47.550.000	5.568.919	41.981.081
Pembayaran RPATA	00007T	08-01-2026	00007A	08-01-2026	260190000001313	09-01-2026	9.047.000	1.059.559	7.987.441
Pembayaran RPATA	00006T	06-01-2026	00006A	08-01-2026	260190000001329	09-01-2026	127.206.222	14.898.026	112.308.196
Pembayaran RPATA	00005T	06-01-2026	00005A	08-01-2026	260190000001326	09-01-2026	17.045.160	1.996.280	15.048.880
Pembayaran RPATA	00004T	06-01-2026	00004A	08-01-2026	260190000001333	09-01-2026	8.476.360	992.727	7.483.633
Pembayaran RPATA	00003T	06-01-2026	00003A	08-01-2026	260190000001314	09-01-2026	602.563.500	67.856.250	534.707.250
Pembayaran RPATA	00002T	06-01-2026	00002A	08-01-2026	260190000001096	08-01-2026	20.095.561	2.352.363	17.743.198
Pembayaran RPATA	00001T	06-01-2026	00001A	08-01-2026	260190000001325	09-01-2026	51.766.182	6.062.706	45.703.476

- Jumlah sebesar **Rp70,763,690,00** merupakan selisih antara dana yang tersedia di RPATA dengan pembayaran kepada pihak ketiga, telah dilakukan Penihilan RPATA dengan SPP nomor 00010A tanggal 8 Januari 2026 untuk Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2025 dengan SP2D Nomor 260190000001330 tanggal 9 Januari 2026.

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Matriks pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58 Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

No	Tahun	Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai dan dalam proses tindak lanjut	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti
1	2022	0	0				
2	2023	1	1	1			
3	2024	0	0				

F.3. REKENING PEMERINTAH

Jumlah Rekening pemerintah yang dikelola Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per 31 Desember 2025 adalah sebanyak tiga rekening pengeluaran dalam mata uang rupiah dengan nilai **Rp0,00**, dan satu rekening lainnya dalam mata uang rupiah dengan nilai **Rp0,00**. Rekapitulasi daftar rekening lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 59 Daftar Rekening Lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

No	Nomor Rekening	Bank/Kantor Pusat	Saldo 31 Des 2025	Keterangan
1	1013-000-6776-954	Bank Mandiri KCP Jakarta Kementerian Keuangan KPPN II	0	Rekening Lainnya
2	1013-000-7678-334	Bank Mandiri KCP Jakarta Kementerian Keuangan KPPN II	0	Rekening untuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
3	810124049411001	Bank Mandiri KCP Jakarta KPPN II	0	Rekening virtual BPP untuk Transaksi Pembayaran dan Penerimaan pada Rekening Induk RPK DJPK Kemenkeu Ops
4	810124049411001	Bank Mandiri KCP Jakarta KPPN II	0	Rekening virtual BPP untuk Transaksi Pembayaran dan Penerimaan pada Rekening Induk RPK DJPK Kemenkeu Ops

F.4. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.4.1 Laporan Keuangan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri

Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery In Indonesia (SINERGIS) Loan Number 9597 ID

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program yang disebut dengan program *Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia* (SINERGIS) untuk secara efektif melaksanakan agenda reformasi UU HKPD. Dalam agenda reformasi UU 1/2022 yang luas, SINERGIS berfokus pada tiga elemen utama dari sistem pengelolaan keuangan antar pemerintahan di Indonesia: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), serta penguatan dan penyederhanaan proses pengelolaan keuangan publik pemerintah daerah dengan mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Financial Management Information System, FMIS) Pemerintah Daerah. Program ini dilaksanakan melalui pinjaman Bank Dunia dengan mekanisme Program-for-Result (PforR), suatu instrumen pinjaman yang menyalurkan pinjaman ke kas negara apabila indikator-indikator terkait pencairan telah tercapai. Dalam terminology pemerintah, pinjaman PforR termasuk dalam kategori “pinjaman program”. Pada kategori ini, pinjaman akan disalurkan langsung ke kas negara dan tidak digunakan untuk membiayai proyek/kegiatan tertentu

Instrumen PforR memungkinkan pemerintah untuk memantau pencapaian capaian tertentu yang dirumuskan sebagai Indikator terkait untuk pencairan dana (Disbursement-Linked Indicators, DLIs) dan hasil terkait Pencairan Dana (Disbursement-Linked Results, DLRs) dan untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi antar lembaga untuk menghilangkan hambatan yang menghambat pencapaian capaian reformasi. Program ini juga akan mendapat dukungan hibah yang memungkinkan pemerintah membiayai bantuan teknis dan kegiatan pemberian masukan kebijakan untuk mencapai tonggak capaian reformasi

Total pembiayaan PforR adalah sebesar **EUR 367,9 juta** (setara dengan **US\$ 400 juta**). Pinjaman tersebut diberikan oleh Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), dengan nomor pinjaman 9597-ID. Perjanjian pinjaman ini ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2023 (IBRD Ln.9597-ID) oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. PforR SINERGIS ini dilaksanakan selama durasi Program 6 tahun (2024-29). Untuk mendukung pelaksanaan PforR SINERGIS, disediakan hibah pelengkap sebesar **US\$ 2,5 juta** melalui Dana Perwalian Multi Donor Pengelolaan Keuangan Publik (*Public Financial Management Multi Donor Trust Fund*, PFM MDTF), yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025

Tujuan Pengembangan Program (*Program Development Objective/PDO*) dari Program SINERGIS ini adalah untuk meningkatkan pemerataan, efisiensi, dan akuntabilitas belanja daerah yang dibiayai oleh transfer antar pemerintah. Selain pemerataan, dimensi efisiensi dan akuntabilitas mencerminkan kualitas belanja daerah. Ruang lingkup “transfer antar pemerintah” yang termasuk dalam program ini meliputi DAU dan DAK Fisik. Cakupan sektoral DAK Fisik meliputi sektor kesehatan, jalan, dan air. Sedangkan cakupan “Sektor-sektor DAU” terdiri dari sektor kesehatan dan infrastruktur (jalan dan air).

Pencairan pinjaman dari Bank Dunia bergantung pada pencapaian hasil yang akan diukur melalui Indikator Terkait Pencairan Dana (*Disbursement Linked Indicators/DLI*) dan Hasil Terkait Pencairan Dana (*Disbursement Linked Results/DLRs*), berdasarkan tiga RA di atas. Tabel berikut ini, yang identik dengan Perjanjian Pinjaman, merinci masing-masing DLI, DLR, dan alokasi jumlah pinjamannya.

Tabel 60 DLI, DLR, dan Lini Masa Indikatif

Judul DLI	Hasil Terkait Pencairan Dana (<i>Disbursement-Linked Results, DLRs</i>)	Jumlah alokasi pinjaman (dinyatakan dalam EUR)	Setara US\$	Lini masa indikatif untuk pencapaian ¹
DLI 1. DAU mendukung pemerataan kapasitas pembiayaan pemberian layanan yang lebih baik di tingkat kabupaten/kota.	DLR 1.1. (hasil dicapai sebelumnya) Kementerian Keuangan telah mengalokasikan DAU ke Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari model ekonometrik berbasis PDRB yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Protokol Verifikasi.	€ 15.874.885	US\$ 17.260.000	Segara setelah Program SINERGIS berlaku secara efektif
	DLR 1.2. Kementerian Keuangan setiap tahunnya membuat alokasi DAU berdasarkan (i) faktor penyesuaian yang komprehensif dan hemat biaya pada sektor-sektor DAU, dan (ii) perkiraan PAD yang berasal dari model ekonometrik berbasis PDRB yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Protokol Verifikasi.	€ 17.659.200	US\$ 19.200.000	Mulai paling cepat pada 2024
	DLR 1.3. Penurunan rasio antara pertumbuhan rata-rata DAU tahunan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai daerah yang dikenai prinsip <i>hold harmless</i> dan pertumbuhan DAU tahunan untuk semua Kabupaten/Kota, yang masing-masing diukur tanpa menyertakan pertumbuhan belanja pegawai Kabupaten/Kota tahunan yang berlaku.	€ 17,659,200	US\$19.200.000	Mulai paling cepat pada 2024

Judul DLI	Hasil Terkait Pencairan Dana (Disbursement-Linked Results, DLRs))	Jumlah alokasi pinjaman (dinyatakan dalam EUR)	Setara US\$	Lini masa indikatif untuk pencapaian ¹
	DLR 1.4. Penurunan kumulatif rasio median nasional pendapatan daerah per kapita Kabupaten/Kota dan pendapatan daerah per kapita pada kuintil Kabupaten/Kota yang paling banyak penduduknya.	€ 22.074.000	US\$24.000.000	Mulai paling cepat pada 2024
DLI 2. Pembedaan/Diferensiasi DAU guna membantu Kabupaten/Kota yang kinerjanya rendah untuk meningkatkan hasil-hasil pemberian layanan.	DLR 2.1. Pada Tahun ke-1, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai DAU <i>Earmarking</i> yang menggunakan indikator kinerja yang tepat untuk sektor-sektor DAU dan memuat aturan mengenai Rencana Peningkatan Kinerja (<i>Performance Improvement Plans</i> , PIP), serta Kementerian Keuangan melalui konsultasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Bappenas, telah mengeluarkan pedoman yang menguraikan kerangka kerja PIP.	€ 4.598.750	US\$ 5.000.000	2024
	DLR 2.2. Kementerian Keuangan setiap tahunnya telah mengalokasikan setidaknya 60 persen alokasi DAU <i>Earmark</i> kepada 33 persen Kabupaten/Kota dengan kinerja terendah, dan mengalokasikan besaran DAU <i>Earmark</i> berdasarkan norma pengeluaran per kapita, dalam setiap kasus, untuk sektor-sektor DAU	€ 19.866.600	US\$ 21.600.000	Mulai paling cepat pada 2024
	DLR 2.3. Jumlah kumulatif Kabupaten/Kota dengan kinerja rendah yang telah melaksanakan PIP (Rencana Peningkatan Kinerja/ <i>Performance Improvement Plans</i>) sektoral secara efektif di Sektor-sektor DAU.	€ 30.903.600	US\$ 33.600.000	Mulai paling cepat pada 2025
DLI 3. Peningkatan penetapan sasaran dan prediktabilitas DAK Fisik.	DLR 3.1. Terkait DAK Fisik untuk masing-masing DAK Sektoral, Pemerintah setiap tahunnya (i) berdasarkan RPJMN, mengadopsi Kerangka Kerja Jangka Menengah termasuk kriteria lokasi prioritas; dan (ii) memberikan alokasi indikatif untuk masing-masing DAK Sektoral dan mengumumkan indeks teknis dan indeks DAK Fisik lainnya yang berlaku.	€ 17.659.200	US\$ 19.200.000	Mulai paling cepat pada 2025 dan 2024 untuk masing-masing hasil (i) dan (ii)
	DLR 3.2. Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Bappenas setiap tahunnya menerapkan kriteria yang transparan untuk menyaring usulan DAK Fisik secara efektif untuk DAK Sektoral.	€ 13.244.400	US\$ 14.400.000	Mulai paling cepat pada 2024
	DLR 3.3. Kementerian Keuangan setiap tahunnya meningkatkan persentase DAK Fisik yang dialokasikan kepada 40 persen kabupaten/kota dengan kesenjangan infrastruktur terbesar di DAK Sektoral.	€ 24.833.250	US\$ 27.000.000	Mulai paling cepat pada 2024
	DLR 3.4. Kementerian Keuangan setiap tahunnya telah mengurangi volatilitas alokasi DAK Fisik di DAK Sektoral dari tahun ke tahun.	€ 25.329.915	US\$ 27.540.000	Mulai paling cepat pada 2024
DLI 4. Sistem pengukuran kinerja DAK Fisik diperkenalkan.	DLR 4.1. Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR telah melakukan uji coba dan kemudian Kementerian Keuangan mensyaratkan verifikasi tahunan independen atas indikator kinerja dan kebutuhan untuk DAK Sektoral sesuai dengan Instrumen Verifikasi.	€ 19.866.600	US\$ 21.600.000	Mulai paling cepat pada 2024

Judul DLI	Hasil Terkait Pencairan Dana (Disbursement-Linked Results, DLRs))	Jumlah alokasi pinjaman (dinyatakan dalam EUR)	Setara US\$	Lini masa indikatif untuk pencapaian ¹
	DLR 4.2: (i) Kementerian Keuangan telah mengalokasikan DAK Fisik ke Kabupaten/Kota, dan (ii) Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR telah memberikan dukungan pembangunan kapasitas kepada Kabupaten/Kota, dalam setiap kasus, berdasarkan indikator kinerja sektoral sebagaimana telah diverifikasi dalam DLR 4.1.	€ 26.488.800	US\$ 28.800.000	Mulai paling cepat pada 2026 dan 2025 untuk masing-masing hasil (i) dan (ii)
DLI 5. SIKD yang Ditingkatkan digunakan oleh para pemangku kepentingan utama.	DLR 5.1: Untuk DAK Sektoral, DJPK telah (i) menyediakan indikator kinerja belanja Daerah untuk setidaknya 50 persen Kabupaten/Kota, (ii) memungkinkan dilakukannya pelacakan kinerja proyek DAK Fisik secara <i>end-to-end</i> untuk setidaknya 50 persen DAK kabupaten/kota penerima, dan (iii) memungkinkan dilakukannya penandaan (<i>tagging</i>) pada proyek-proyek DAK Fisik yang responsif terhadap perubahan iklim untuk setidaknya 50 persen Kabupaten/Kota penerima DAK, dalam setiap kasus, di dalam SIKD yang Ditingkatkan.	€ 17.659.200	US\$ 19.200.000	Mulai paling cepat pada 2025
	DLR 5.2: Jumlah Pengguna SIKD yang Ditingkatkan pada Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, dan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah.	€ 19.130.800	US\$ 20.800.000	Mulai paling cepat pada 2026
DLI 6. Sistem PFM Kabupaten/Kota diperkuat dan meningkatkan transparansi fiskal.	DLR 6.1: Kemendagri telah (i) mengadopsi pedoman teknis dan spesifikasi fungsional untuk penyempurnaan SIPD; dan (ii) membentuk unit khusus untuk memimpin pelaksanaan SIPD yang disempurnakan, yang dalam setiap kasus, memenuhi persyaratan dalam Protokol Verifikasi.	€ 9.197.500	US\$ 10.000.000	Paling cepat pada 2024
	DLR 6.2: Kemendagri, melalui konsultasi dengan Kemenkeu, telah menyederhanakan dan menyelaraskan BC/COA Pemerintah Daerah untuk memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Protokol Verifikasi.	€ 19.866.600	US\$ 21.600.000	Paling cepat pada 2025
	DLR 6.3: Kemendagri telah (i) mengembangkan dan (ii) berhasil melakukan uji coba SIPD yang Disempurnakan, dalam setiap kasus, memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Protokol Verifikasi.	€ 17.659.200	US\$ 21.600.000	Paling cepat pada 2025
	DLR 6.4: Jumlah kumulatif Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan laporan keuangan fiskal elektronik terstandarisasi secara tepat waktu kepada Kemendagri dan DJPK, serta menerbitkan ringkasan anggaran dan kinerja, dalam setiap kasus, menggunakan SIPD yang disempurnakan.	€ 28.328.300	US\$ 30.800.000	Mulai paling cepat pada 2027
Total		€ 367.900.000	US\$ 400.000.000	

Pencairan pinjaman dari Bank Dunia bergantung pada pencapaian hasil yang akan diukur melalui Indikator Terkait Pencairan Dana (*Disbursement Linked Indicators*/DLI) dan Hasil Terkait Pencairan Dana (*Disbursement Linked Results*/DLRs), berdasarkan tiga RA di atas. Tabel berikut

ini, yang identik dengan Perjanjian Pinjaman, merinci masing-masing DLI, DLR, dan alokasi jumlah pinjamannya. dan Bappenas.

Pada tahun 2025 *Loan* nomor 9597-ID telah berhasil mencapai Indikator Terkait Pencairan Dana yaitu sebagai berikut:

Tabel 61 Rincian Indikator Terkait Pencairan Dana

Tahun	Hasil Terkait Pencairan Dana (<i>Disbursement-Linked Results, DLRs</i>)	Hasil Verifikasi	Estimated Loan Disbursement
2025	DLI 1. DAU mendukung pemerataan kapasitas pembiayaan pemberian layanan yang lebih baik di tingkat kabupaten/kota. DLR 1.2 Pengalokasian DAU dilakukan menggunakan model ekonometrik berbasis PDRB	Tercapai	US\$3,200,000 atau setara €2,943,200
2025	DLI 1. DAU mendukung pemerataan kapasitas pembiayaan pemberian layanan yang lebih baik di tingkat kabupaten/kota. DLR 1.4 Penurunan kumulatif rasio median nasional pendapatan per kapita Kabupaten/Kota dan pendapatan per kapita pada kuintil Kabupaten/Kota yang paling banyak penduduknya	Tercapai sebagian. Penurunan kumulatif hanya 0,04.	US\$12,000,000 atau setara €11,037,000
2025	DLI 3. Peningkatan penetapan sasaran dan prediktabilitas DAK Fisik. DLR 3.3 Kementerian Keuangan setiap tahunnya meningkatkan persentase DAK Fisik yang dialokasikan ke 40 persen Kabupaten/Kota dengan kesenjangan infrastruktur terbesar di DAK Sektoral.	Tercapai	US\$3,000,000 atau setara €2,759,250
2025	DLI 4. Sistem pengukuran kinerja DAK Fisik diperkenalkan. DLR 4.1 Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR telah melakukan uji coba (piloting) verifikasi kebutuhan dan indikator kinerja DAK Sektoral.	Tercapai	US\$4,800,000 atau setara €4,414,800
Total			US\$23,000,000 atau setara €21,154,250

Beberapa kegiatan yang antara lain dapat diidentifikasi mendukung Kegiatan *Boundaries* PforR Program Sinergis baik dengan sumber dana Rupiah Murni maupun Hibah Terencana dengan anggaran sebesar Rp8.928.254.000,00 dan realisasi Rp8.533.836.983,00 atau 95,58 persen terhadap anggaran. Rinciannya sebagai berikut:

1. Anggaran Rupiah Murni sebesar Rp760.846.000,00 dan realisasi Rp757.000.744,00 atau 99,49 persen terhadap anggaran; dan
2. Anggaran Hibah Terencana sebesar Rp8.167.408.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.776.836.239,00 atau 95,22 persen terhadap anggaran.

Tabel 62 Rincian RO dan Sub Komponen Tahun 2025

No	RO dan Sub Komponen	Pagu Netto	Realisasi	%
	Rupiah Murni	760.846.000	757.000.744	99,49%
1	Bimtek Transfer ke Daerah (PU)			
a	Bimtek Pengelolaan DTK	6.725.000	6.725.000	100,00%
b	Bimtek Pengelolaan DTU	96.470.000	96.468.458	100,00%
c	KIE Pengelolaan DAK Fisik	6.028.000	6.027.500	99,99%
2	PMK terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa			
a	Harmonisasi Rancangan Peraturan terkait Dana Transfer Umum	9.900.000	9.887.500	99,87%
b	Pengumpulan Data-data terkait Dana Transfer Umum	1.625.000	1.625.000	100,00%
3	Rincian Alokasi DAU	44.800.000	44.783.768	99,96%
4	Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik	23.108.000	23.107.500	100,00%
5	Penyusunan Perubahan Perpres Juknis DAK	15.525.000	13.832.994	89,10%
6	Rincian Alokasi DAK Fisik			
a	Penyusunan dan Penghitungan Alokasi DAK Fisik	15.600.000	15.513.368	99,44%
b	Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan DAK Fisik	24.501.000	24.500.431	100,00%
7	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L - DAK Fisik	76.507.000	76.318.529	99,75%
8	Data Keuangan Daerah (PU)	230.669.000	230.293.739	99,84%
9	Data Non Keuangan Daerah	52.139.000	52.136.922	100,00%
10	Laporan Keuangan TKD dan Hibah	14.202.000	14.039.800	98,86%
11	Perencanaan Kas Penyaluran TKD dan DIPA TKD	56.864.000	55.623.780	97,82%
12	Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	86.183.000	86.116.455	99,92%
	Hibah Terencana Sinergis	8.167.408.000	7.776.836.239	95,22%
1	Dukungan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga			
a	Finalization of DIPA due to AWPB Revisions	123.700.000	123.691.872	99,99%
b	Grant Monitoring Evaluation Workshop	255.830.000	255.779.344	99,98%
c	Interagency Coordination Meeting	201.132.000	201.128.357	100,00%
d	Interagency Reform Team Meeting	32.400.000	30.089.809	92,87%
e	Monitoring and Evaluation Site Visit	603.480.000	515.700.311	85,45%
f	Program Management Office	1.665.150.000	1.662.453.574	99,84%
g	Steering Committee Meeting	13.680.000	-	0,00%
h	Technical Committee Meeting	6.480.000	-	0,00%
2	Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik			
a	Workshop Peningkatan Kapasitas APIPDA selaku Asistance Verivicator Independent atas KInerja DAK F di TRW 2 2025	981.041.000	963.800.787	98,24%
3	Rekomendasi Kebijakan DAU			
a	Adjustment Factors Workshop	694.860.000	679.018.038	97,72%
b	Coordination Meeting	33.575.000	33.307.204	99,20%
c	Konsultan Pendukung Implementasi DAU Reform	511.012.000	511.011.200	100,00%
d	Supervision and Monitoring Cost Central Government	528.570.000	504.615.866	95,47%
e	Working Group on Cost Adjustment Factors	347.754.000	302.249.328	86,91%
f	Working Group on PIP Implementation	386.984.000	320.777.656	82,89%
4	Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan			
a	District Thematic Working Group	505.337.000	454.427.974	89,93%
b	Pengembangan Fiscal Enterprise Data Platform SIKD	1.276.423.000	1.218.784.919	95,48%
	Rupiah Murni dan Hibah Terencana Sinergis	8.928.254.000	8.533.836.983	95,58%



LAPORAN KEUANGAN PENDUKUNG & CETAKAN- CETAKAN SAKTI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 06
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 440941

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 4:22 PM
Halaman : 1
lap_fra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	286,018,345	286,018,345	0	0	285,281,658	(285,281,658)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	286,018,345	286,018,345	0	0	285,281,658	(285,281,658)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	286,018,345	286,018,345	0	0	285,281,658	(285,281,658)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	84,441,231,000	47,302,407,636	(37,138,823,364)	56	77,990,805,000	70,182,549,393	7,808,255,607	90
1. Belanja Pegawai	4,424,288,000	4,041,698,000	(382,590,000)	91	3,691,657,000	3,662,339,000	29,318,000	99
2. Belanja Barang	72,266,289,000	36,126,915,639	(36,139,373,361)	50	63,907,611,000	56,241,899,346	7,665,711,654	88
3. Belanja Modal	7,750,654,000	7,133,793,997	(616,860,003)	92	10,391,537,000	10,278,311,047	113,225,953	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	84,441,231,000	47,302,407,636	(37,138,823,364)	56	77,990,805,000	70,182,549,393	7,808,255,607	90
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 4:22 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	59,742,906	50,733,906	9,009,000	17.76
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(50,778,951)	(50,733,906)	(45,045)	0.09
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	8,963,955	0	8,963,955	0.00
Persediaan	1,431,185,340	1,225,743,174	205,442,166	16.76
JUMLAH ASET LANCAR	1,440,149,295	1,225,743,174	214,406,121	17.49
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	122,200,212,337	115,634,548,845	6,565,663,492	5.68
Gedung dan Bangunan	1,427,595,200	1,427,595,200	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,054,349,217	669,888,518	384,460,699	57.39
AKUMULASI PENYUSUTAN	(105,790,888,017)	(98,019,130,041)	(7,771,757,976)	7.93
JUMLAH ASET TETAP	18,891,268,737	19,712,902,522	(821,633,785)	(4.17)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	11,457,396,464	13,454,416,464	(1,997,020,000)	(14.84)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	954,513,675	1,236,983,804	(282,470,129)	(22.84)
Aset Lain-lain	0	8,420,095,510	(8,420,095,510)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(10,551,594,657)	(19,638,304,512)	9,086,709,855	(46.27)
JUMLAH ASET LAINNYA	1,860,315,482	3,473,191,266	(1,612,875,784)	(46.44)
JUMLAH ASET	22,191,733,514	24,411,836,962	(2,220,103,448)	(9.09)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	883,749,985	1,299,765,029	(416,015,044)	(32.01)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	883,749,985	1,299,765,029	(416,015,044)	(32.01)
JUMLAH KEWAJIBAN	883,749,985	1,299,765,029	(416,015,044)	(32.01)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	21,307,983,529	23,112,071,933	(1,804,088,404)	(7.81)
JUMLAH EKUITAS	21,307,983,529	23,112,071,933	(1,804,088,404)	(7.81)
JUMLAH EKUITAS	21,307,983,529	23,112,071,933	(1,804,088,404)	(7.81)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,191,733,514	24,411,836,962	(2,220,103,448)	(9.09)

Jakarta, Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON I : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 4:22 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,980,907,000	3,723,130,000	257,777,000	6.924
Beban Persediaan	830,757,296	1,162,800,484	(332,043,188)	(28.555)
Beban Barang dan Jasa	48,261,083,846	43,089,664,897	5,171,418,949	12.002
Beban Pemeliharaan	6,055,065,286	7,665,466,271	(1,610,400,985)	(21.009)
Beban Perjalanan Dinas	10,794,861,753	24,798,370,143	(14,003,508,390)	(56.469)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,226,129,134	11,926,855,784	(2,700,726,650)	(22.644)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	45,045	(74,941)	119,986	(160.107)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,271,174,179	11,851,910,843	(2,580,706,664)	(14.31)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(79,148,849,360)	(92,366,212,638)	13,217,363,278	(14.31)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(79,749,449)	149,454,654	(229,204,103)	(153.36)
Pendapatan Pelepasan Aset	201,885,812	149,454,654	52,431,158	35.082
Beban Pelepasan Aset	281,635,261	0	281,635,261	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84,104,533	115,723,344	(31,618,811)	(27.323)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84,104,533	115,723,344	(31,618,811)	(27.323)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,355,084	265,177,998	(260,822,914)	(96.358)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(79,144,494,276)	(92,101,034,640)	12,956,540,364	(14.068)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(79,144,494,276)	(92,101,034,640)	12,956,540,364	(14.068)

Jakarta, Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 12:54 PM

Tgl Cetak : 07/05/26 4:22 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	23,112,071,933	26,442,894,850	(3,330,822,917)	(12.6)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(79,144,494,276)	(92,101,034,640)	12,956,540,364	(14.07)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	77,340,405,872	88,770,211,723	(11,429,805,851)	(12.88)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,804,088,404)	(3,330,822,917)	1,526,734,513	(45.84)
EKUITAS AKHIR	21,307,983,529	23,112,071,933	(1,804,088,404)	(7.81)

Jakarta, Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

NERACA PERCOBAAN AKRUAL (SALDO AWAL)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 440941

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 07/05/2026 5:04 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,733,906	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	50,733,906
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,176,426,414	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	49,316,760	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	115,634,548,845	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,427,595,200	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	669,888,518	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	97,781,683,712
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	237,446,329
0.0	162151	Software	12,582,811,248	0
0.0	162161	Lisensi	871,605,216	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,236,983,804	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8,420,095,510	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8,346,095,510
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	10,897,949,848
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	394,259,154
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	60,791,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,018,225
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,236,955,804
0.0	391111	Ekuitas	0	23,112,071,933
JUMLAH			142,120,005,421	142,120,005,421

Jakarta, Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 2:34 PM
Tgl Cetak : 07/05/26 4:55 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,733,906	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	9,009,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	50,733,906
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	45,045
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,394,248,926	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	36,936,414	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	122,200,212,337	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,427,595,200	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	590,555,958	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	463,793,259	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	105,514,420,414
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	276,467,603
0.0	162151	Software	10,585,791,248	0
0.0	162161	Lisensi	871,605,216	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	954,513,675	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	10,083,481,936
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	468,112,721
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	883,749,985
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	47,302,407,636
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	286,018,345	0
0.0	313211	Transfer Keluar	605,625,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	237,000,000
0.0	391111	Ekuitas	0	23,112,071,933
0.0	391131	Penghasilan Hibah Langsung	0	30,692,641,581
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	201,885,812
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	456,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	83,648,533
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,664,067,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	316,820,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	7,170,995,069	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,718,680	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	324,930,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,903,506,817	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	60,700,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	142,759,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	97,515,333	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultansi	33,213,354,605	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,006,392,832	0

3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,230,936,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,089,275,510	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,323,109,452	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,662,331,981	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10,554,397,896	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	240,463,857	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8,383,847,205	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39,021,274	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	729,407,088	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	73,853,567	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	830,757,296	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	69,623,853	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	45,045	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	281,635,261	0
JUMLAH			218,907,123,105	218,907,123,105

Jakarta, Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl Data : 07/05/26 12:54 PM

Tgl Cetak : 07/05/26 4:22 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	47,302,407,636
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	286,018,345	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	201,885,812
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	456,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	83,676,533
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,725,712,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	316,820,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,170,995,069	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,718,680	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	325,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,903,506,817	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	60,700,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	142,759,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,048,579,808	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	99,533,558	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	2,520,713,024	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,006,392,832	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,230,936,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,090,391,651	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,922,674,410	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57,243,507	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,733,095,671	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,565,322,325	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240,463,857	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,981,313,997	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	152,480,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	834,000
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	70,000
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	1,116,141
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	10,924,429
JUMLAH			47,601,370,551	47,601,370,551

Jakarta, Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/26 5:00 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	201,885,812	0	201,885,812	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	201,885,812	0	201,885,812	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	456,000	0	456,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	83,676,533	0	83,676,533	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	84,132,533	0	84,132,533	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	286,018,345	0	286,018,345	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	286,018,345	0	286,018,345	

Jakarta, Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

LAPORAN REALISASI BELANJA PER AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 440941
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 4:59 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 3:50 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,820,655,000	4,029,991,000	3,725,712,000	834,000	3,724,878,000	92.43	305,113,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,820,655,000	4,029,991,000	3,725,712,000	834,000	3,724,878,000	92.43	305,113,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	259,680,000	394,297,000	316,820,000	0	316,820,000	80.35	77,477,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	259,680,000	394,297,000	316,820,000	0	316,820,000	80.35	77,477,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,080,335,000	4,424,288,000	4,042,532,000	834,000	4,041,698,000	91.35	382,590,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,481,817,000	11,023,481,000	7,170,995,069	0	7,170,995,069	65.05	3,852,485,931
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	60,000,000	20,724,000	20,718,680	0	20,718,680	99.97	5,320
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	383,040,000	326,596,000	325,000,000	70,000	324,930,000	99.49	1,666,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	7,924,857,000	11,370,801,000	7,516,713,749	70,000	7,516,643,749	66.1	3,854,157,251
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	7,231,072,000	22,414,438,000	2,903,506,817	0	2,903,506,817	12.95	19,510,931,183
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	142,120,000	60,700,000	60,700,000	0	60,700,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	872,260,000	142,759,000	142,759,000	0	142,759,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	8,245,452,000	22,617,897,000	3,106,965,817	0	3,106,965,817	13.74	19,510,931,183
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,250,000,000	1,050,000,000	1,048,579,808	0	1,048,579,808	99.86	1,420,192
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,250,000,000	1,050,000,000	1,048,579,808	0	1,048,579,808	99.86	1,420,192
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langgananan Telepon	200,400,000	99,540,000	99,533,558	0	99,533,558	99.99	6,442
522131	Belanja Jasa Konsultan	2,863,689,000	2,528,162,000	2,520,713,024	0	2,520,713,024	99.71	7,448,976
522141	Belanja Sewa	1,352,990,000	1,006,707,000	1,006,392,832	0	1,006,392,832	99.97	314,168
522151	Belanja Jasa Profesi	4,422,170,000	1,286,637,000	1,230,936,000	0	1,230,936,000	95.67	55,701,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,100,453,000	2,099,855,000	2,080,391,651	1,116,141	2,089,275,510	99.5	10,579,490
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,939,702,000	7,020,901,000	6,947,967,065	1,116,141	6,946,850,924	98.95	74,050,076
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,481,646,000	1,922,728,000	1,922,674,410	0	1,922,674,410	100	53,590
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	120,000,000	57,270,000	57,243,507	0	57,243,507	99.95	26,493
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,898,490,000	4,794,601,000	4,733,095,671	0	4,733,095,671	98.72	61,505,329
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	666,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	7,166,136,000	6,774,599,000	6,713,013,588	0	6,713,013,588	99.09	61,585,412
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,809,017,000	23,179,974,000	10,565,322,325	10,924,429	10,554,397,896	45.53	12,625,576,104
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	171,471,000	252,117,000	240,463,857	0	240,463,857	95.38	11,653,143
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,647,406,000	0	0	0	0		0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,270,221,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	33,898,115,000	23,432,091,000	10,805,786,182	10,924,429	10,794,861,753	46.07	12,637,229,247
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	54,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	54,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	71,478,262,000	72,266,289,000	36,139,026,209	12,110,570	36,126,915,639	49.99	36,139,373,361
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,501,330,000	7,186,654,000	6,981,313,997	0	6,981,313,997	97.14	205,340,003
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,501,330,000	7,186,654,000	6,981,313,997	0	6,981,313,997	97.14	205,340,003
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	2,997,342,000	564,000,000	152,480,000	0	152,480,000	27.04	411,520,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	2,997,342,000	564,000,000	152,480,000	0	152,480,000	27.04	411,520,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,498,672,000	7,750,654,000	7,133,793,997	0	7,133,793,997	92.04	616,860,003
	JUMLAH BELANJA	81,057,269,000	84,441,231,000	47,315,352,206	12,944,570	47,302,407,636	56.02	37,138,823,364

Jakarta, Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

LAPORAN KINERJA UNIT ORGANISASI

Kementerian Negara/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Eselon 1 : 015.06 - DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
Fungsi : 01 - Pelayanan Umum
Sub Fungsi : 01 - Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN			
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	28.648.902.000	10.546.585.526	36,8%				
4779	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	17.434.961.000	5.922.522.293	34,0%				
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	13.270.280.000	3.947.097.531	29,7%				
001	Internship dan Secondment	122.928.000	0	0,0%	70	12	Orang	17%
002	Pengelolaan Jafung	869.960.000	43.056.500	5,0%	750	750	Orang	100%
003	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa	868.000.000	0	0,0%	560	0	Orang	0%
301	Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik (PU)	260.568.000	23.107.500	8,9%	300	300	Orang	100%
302	Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	11.148.824.000	3.880.933.531	34,8%	11.500	11.500	Orang	100%
UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.778.055.000	812.421.194	45,7%				
201	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	1.778.055.000	812.421.194	45,7%	1.150	1.150	Orang	100%
UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	2.386.626.000	1.163.003.568	48,7%				
201	Bimtek BUMDes (PN)	2.386.626.000	1.163.003.568	48,7%	2.000	2.000	Desa	100%
4780	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	2.398.528.000	570.052.386	23,8%				
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.380.096.000	117.671.905	8,5%				
001	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	230.712.000	37.110.557	16,1%	3	3	Rekomendasi	100%
002	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	362.510.000	48.936.993	13,5%	5	5	Rekomendasi	100%
301	Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)	534.184.000	0	0,0%	1	1	Rekomendasi	100%
303	Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU)	114.640.000	13.781.515	12,0%	1	1	Rekomendasi	100%

304	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	138.050.000	17.842.840	12,9%	1	1	Rekomendasi	100%
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.018.432.000	452.380.481	44,4%				
201	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	1.018.432.000	452.380.481	44,4%	2	2	Rekomendasi	100%
4781	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	3.303.167.000	553.723.834	16,8%				
FAD	Perencanaan dan Penganggaran	2.205.323.000	408.373.242	18,5%				
002	Rincian Alokasi DAU	283.800.000	44.783.768	15,8%	1	1	Dokumen	100%
003	Rincian Alokasi DAK Fisik	418.958.000	40.013.799	9,6%	1	1	Dokumen	100%
004	Rincian Alokasi DAK Nonfisik	176.447.000	35.733.146	20,3%	1	1	Dokumen	100%
005	Rincian Alokasi Hibah Daerah	356.798.000	43.564.000	12,2%	1	1	Dokumen	100%
006	Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus	120.560.000	27.293.700	22,6%	1	1	Dokumen	100%
007	Rincian Alokasi Dana Keistimewaan	166.620.000	96.132.508	57,7%	1	1	Dokumen	100%
008	Rincian Alokasi Dana Desa	217.260.000	18.269.800	8,4%	1	1	Dokumen	100%
009	Rincian Alokasi Insentif Fiskal	153.900.000	39.399.950	25,6%	1	1	Dokumen	100%
011	Rincian Alokasi DBH SDA	156.138.000	36.000.000	23,1%	1	1	Dokumen	100%
012	Rincian Alokasi DBH Non SDA	154.842.000	27.182.571	17,6%	1	1	Dokumen	100%
FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	770.657.000	69.663.580	9,0%				
001	Laporan Keuangan TKD dan Hibah	264.160.000	14.039.800	5,3%	1	1	Laporan	100%
002	Perencanaan Kas Penyaluran TKD dan DIPA TKD	506.497.000	55.623.780	11,0%	4	4	Laporan	100%
UAD	Perencanaan dan Penganggaran	327.187.000	75.687.012	23,1%				
201	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	327.187.000	75.687.012	23,1%	1	1	Dokumen	100%
4782	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	5.512.246.000	3.500.287.013	63,5%				
AAD	Peraturan Presiden	143.307.000	13.832.994	9,7%				
001	Perpres Juknis DAK	143.307.000	13.832.994	9,7%	1	1	R.Perpres	100%
AAG	Peraturan Menteri	226.028.000	11.512.500	5,1%				
001	PMK terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa	226.028.000	11.512.500	5,1%	5	5	Permen	100%
AAH	Peraturan lainnya	74.559.000	4.413.500	5,9%				
001	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian	74.559.000	4.413.500	5,9%	2	2	Peraturan	100%

	Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah							
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5.068.352.000	3.470.528.019	68,5%				
001	Rekomendasi Kebijakan DAU	2.502.755.000	2.350.979.292	93,9%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
002	Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik	1.139.343.000	963.800.787	84,6%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
003	Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik	172.436.000	36.947.581	21,4%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
004	Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah	172.531.000	19.890.000	11,5%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
005	Rekomendasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus	230.160.000	0	0,0%	2	0	Rekomendasi Kebijakan	0%
006	Rekomendasi Kebijakan Dana Keistimewaan	111.560.000	0	0,0%	1	0	Rekomendasi Kebijakan	0%
007	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	194.814.000	50.223.134	25,8%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
008	Rekomendasi Kebijakan Dana Desa	320.461.000	48.687.225	15,2%	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100%
009	Rekomendasi Kebijakan DBH SDA	112.146.000	0	0,0%	1	0	Rekomendasi Kebijakan	0%
010	Rekomendasi Kebijakan DBH Non SDA	112.146.000	0	0,0%	1	0	Rekomendasi Kebijakan	0%
CE	Program Kebijakan Fiskal	4.247.628.000	1.662.212.545	39,1%				
4772	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	4.247.628.000	1.662.212.545	39,1%				
AAG	Peraturan Menteri	979.913.000	870.404.171	88,8%				
001	PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	65.520.000	11.963.940	18,3%	1	1	Permen	100%
002	PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	43.409.000	9.015.223	20,8%	1	1	Permen	100%
003	PMK Turunan PP terkait UU HKPD	870.984.000	849.425.008	97,5%	8	8	Permen	100%
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	3.267.715.000	791.808.374	24,2%				
001	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	83.958.000	1.515.000	1,8%	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100%
003	Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi	557.052.000	542.501.056	97,4%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
004	Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah	99.996.000	6.833.000	6,8%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%

005	Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD	379.819.000	38.350.170	10,1%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
006	Rekomendasi Substansi pengaturan Pedoman penyusunan standar harga dan Analisis Standar Biaya Daerah	140.795.000	17.618.000	12,5%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
007	Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah	201.854.000	30.569.540	15,1%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
301	Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)	284.894.000	27.498.097	9,7%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
302	ALCO Regional (PU)	280.730.000	29.370.768	10,5%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
303	Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)	921.166.000	61.764.148	6,7%	3	3	Rekomendasi Kebijakan	100%
304	KEM PPKF Regional/Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)	317.451.000	35.788.595	11,3%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
WA	Program Dukungan Manajemen	44.987.431.000	35.093.609.565	73,4%				
4728	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	37.241.402.000	28.256.529.131	75,9%				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25.033.436.000	18.254.951.072	72,9%				
001	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	256.352.000	26.872.251	10,5%	3	3	Dokumen	100%
002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	1.413.640.000	967.299.497	68,4%	12	12	Layanan	100%
003	Kerumahtanggaan	3.497.904.000	1.312.408.621	37,5%	12	12	Layanan	100%
994	Layanan Perkantoran	19.865.540.000	15.948.370.703	80,3%	12	12	Layanan	100%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	7.586.654.000	6.981.313.997	92,0%				
001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.705.754.000	1.502.022.247	88,1%	167	66	Unit	40%
002	Gedung/Bangunan	400.000.000	0	0,0%	589	0	M2	0%
003	Kendaraan Bermotor	5.480.900.000	5.479.291.750	100,0 %	9	9	Unit	100%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.621.312.000	3.020.264.062	65,4%				
001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	319.080.000	16.860.000	5,3%	1	1	Dokumen	100%
002	Dokumen Perbendaharaan Unit	730.332.000	7.415.000	1,0%	1	1	Dokumen	100%
003	Laporan Keuangan Unit	108.027.000	5.725.000	5,3%	1	1	Laporan	100%
004	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	157.554.000	8.027.100	5,1%	1	1	Dokumen	100%

006	Dukungan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga	2.925.116.000	2.805.540.417	95,9%	1	1	Laporan	100%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	381.203.000	176.696.545	46,4%	3	3	Laporan	100%
4729	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1.094.980.000	286.439.217	26,2%				
BMB	Komunikasi Publik	1.094.980.000	286.439.217	26,2%				
001	Layanan Kepustakaan	56.514.000	25.636.000	45,4%	12	12	Layanan	100%
002	Pembinaan/Edukasi Publik	186.660.000	0	0,0%	3	3	Kegiatan	100%
003	Kehumasan	458.000.000	101.874.784	22,2%	1	1	Kegiatan	100%
004	Publikasi Media Cetak	268.806.000	158.928.433	59,1%	5	5	Media	100%
005	Publikasi Media Elektronik	125.000.000	0	0,0%	3	3	Media	100%
4730	Pengelolaan Organisasi dan SDM	6.264.815.000	4.391.890.838	70,1%				
ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	20.400.000	3.360.000	16,5%				
001	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	20.400.000	3.360.000	16,5%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.152.486.000	4.299.708.281	69,9%				
001	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1.728.198.000	258.010.281	14,9%	4	4	Laporan	100%
994	Layanan Perkantoran	4.424.288.000	4.041.698.000	91,4%	12	12	Layanan	100%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	91.929.000	88.822.557	96,6%				
001	Pengembangan SDM	91.929.000	88.822.557	96,6%	538	538	Orang	100%
4731	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	163.014.000	58.500	0,0%				
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	163.014.000	58.500	0,0%				
001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	163.014.000	58.500	0,0%	1	1	Dokumen	100%
6609	Legislasi dan Litigasi	223.220.000	94.043.930	42,1%				
AAH	Peraturan lainnya	194.250.000	86.902.030	44,7%				
001	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan	194.250.000	86.902.030	44,7%	6	6	Peraturan	100%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	28.970.000	7.141.900	24,7%				
969	Layanan Bantuan Hukum	28.970.000	7.141.900	24,7%	1	1	Layanan	100%
7789	Pengolahan Data dan Informasi	6.557.270.000	2.064.647.949	31,5%				

BMA	Data dan Informasi Publik	6.557.270.000	2.064.647.949	31,5%				
001	Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	3.165.305.000	1.759.329.348	55,6%	1	1	Dokumen	100%
002	Informasi Konsolidasi Kebijakan Fiskal Nasional	1.079.483.000	22.887.940	2,1%	1	1	Dokumen	100%
003	Data Non Keuangan Daerah	548.516.000	52.136.922	9,5%	3	3	Data	100%
301	Data Keuangan Daerah (PU)	1.763.966.000	230.293.739	13,1%	132	132	Data	100%

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI

PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2025
Hibah Langsung

		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah
1.	Nama Hibah Luar Negeri	<i>Synergies and Collaboration For Basic Service Delivery Acceleration</i> atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT)	
2.	Pemberi Hibah	<i>Departement Of Foreign Affair And Trade</i> (DFAT) - Pemerintah Australia	<i>United States Agency For International Development</i> (USAID)	
3.	Nama Proyek	<i>Synergies and Collaboration For Basic Service Delivery Acceleration</i> atau Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT)	
4.	Grant ID	SA-30.03.2023	497-AA-040 LGP	
5.	No. Register	27BMXZ9A	2F5GEXNA	
6.	Date Sign	30 Maret 2023	6 April 2021	
7.	Date Effective	30 Maret 2023	6 April 2021	
8.	Closing Date	31 Desember 2026	30 September 2025	
9.	Grant Amount	AUD\$160.000.000	USD 38.500.000	
10.	Disbursement pada tahun 2025	Rp26.846.151.471,00	Rp3.846.490.110,00	
11.	Belanja Tahun 2024 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja Barang			
	c. Belanja Modal			
	d. Belanja Bansos			
13.	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap			
	c. Aset Lainnya			
	d. Kewajiban			
	e. Ekuitas	Rp26.846.151.471,00	Rp3.846.490.110,00	Rp30.692.641.581,00
14.	Executing Agency			
15.	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)			

Hibah Terencana

		LK HLN 1
1.	Nama Hibah Luar Negeri	<i>Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS)</i>
2.	Pemberi Hibah	<i>World Bank</i>
3.	Nama Proyek	<i>Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS)</i>
4.	<i>Grant ID</i>	TF 0C4755
5.	No. Register	2S9MDU8A
6.	<i>Date Sign</i>	22 Mei 2024
7.	<i>Date Effective</i>	22 Mei 2024
8.	<i>Closing Date</i>	30 Juni 2025
9.	<i>Grant Amount</i>	USD1,900,000.00
10.	<i>Disbursement</i> pada tahun 2025	Rp 8.167.408.000,00
11.	Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	
	e. Belanja Pegawai	-
	f. Belanja Barang	Rp. 8.003.408.000,00
	g. Belanja Modal	Rp. 164.000.000
	h. Belanja Bansos	-
13.	Neraca (Rupiah)	
	f. Aset Lancar	-
	g. Aset Tetap	-
	h. Aset Lainnya	-
	i. Kewajiban	-
	j. Ekuitas	-
14.	<i>Executing Agency</i>	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
15.	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK

SURAT HASIL REKONSILIASI DENGAN KPPN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 440941 - DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 13/01/26 3:07
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	84,441,231,000	84,441,231,000	0
2	Belanja	47,315,352,206	47,315,352,206	0
3	Pengembalian Belanja	-12,944,570	-12,944,570	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	286,018,345	286,018,345	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	30,692,641,581	30,692,641,581	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026





LAPORAN KEUANGAN

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan (Audited)

